



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) Tahun 2020



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**



Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Taufiq dan HidayahNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam rangka memujudkan “ *good governance* “. Program – program dimaksud yaitu (1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; (2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; (3) Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM); (4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM; (5) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima; (6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (7) Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional; (8) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri; (9) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; (10) Program Pengembangan Ikm dan Industri Kreatif; (11) Program Pengembangan Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) dan ; (12) Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Pontianak, 05 Februari 2021
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak



JUNAIDI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196402061986031014





Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020 melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahunan dari Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah melaksanakan 9 (**sembilan**) **sasaran** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Uraian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat “**Sangat Berhasil**”, dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar, dengan realisasi pencapaian 5,88 (lima koma delapan puluh delapan) % atau 100%
2. **Terkendalinya Laju Inflasi** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat “**Sangat Berhasil**”, dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%
3. **Meningkatnya Volume usaha Ekport** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat “**Sangat Berhasil**”, dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase pelaku eksport dan impor yang dibina, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%
4. **Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat “**Sangat Berhasil**”, dengan indikator kinerja utama :





- a. Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%
5. **Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat **“Sangat Berhasil”**, dengan indikator kinerja utama :
 - a. persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%
6. **Meningkatnya kelayakan perijinan industri** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat **“Sangat Berhasil”**, dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%
7. **Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat **“Sangat Berhasil”**, dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase pertumbuhan industri, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%
8. **Meningkatnya Koperasi yang Aktif** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat **“Sangat Berhasil”**, dengan indikator kinerja utama :
 - a. persentase koperasi aktif, dengan realisasi pencapaian 94.36 (sembilan puluh empat koma tiga puluh enam) % atau 100%
9. **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro** dengan rata-rata pencapaian **92,5%** predikat **“Sangat Berhasil”**, dengan indikator kinerja utama :
 - a. Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru, dengan realisasi pencapaian 100 (seratus) % atau 100%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak selain menggambarkan sejauhmana keberhasilan /



kegagalan pencapaian sasaran sesuai dengan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan tahun 2020, juga memuat hambatan / kendala yang dihadapi. Selanjutnya diungkapkan juga, Strategi pemecahan masalah yang diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Oleh karenanya LaKIP yang disusun ini diharapkan dapat memberikan dayaguna baik untuk peningkatan kinerja organisasi juga mengoptimalkan peran aparatur dalam upaya mewujudkan “*Good Governance*”.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melengkapi sarana prasarana, kebijakan, pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.
2. Pengembangan sistem pelaporan secara online./aplikasi bagi pelaku usaha
3. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.
4. penguatan infrastuktur logistik pangan serta melakukan penguatan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, utamanya pada komoditas daging ayam dan ikan tangkap
5. mendorong masyarakat untuk swasembada komoditi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Melakukan percepatan administrasi pelaksanaan peningkatan dan penyediaan sarana prasarana penunjang perekonomian Kota Pontianak.
7. mengoptimalkan peran Dinas dalam pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok melalui aplikasi.
8. Mengubah manajemen pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk memenuhi standar SNI Pasar (SNI) 8152:201X





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	I.1
A. Gambaran Umum	I.1
B. Permasalahan Utama	I.2
C. Sistematika laporan	I.11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II.13
A. Rencana Strategis	II.13
B. Perjanjian Kinerja	II.15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	III.25
A. Analisis Capaian Kinerja	III.25
B. Realisasi Anggaran	III.63
BAB IV. PENUTUP	IV.67
A. Kesimpulan	IV.67
B. Saran	IV.68
LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis (RS)	
2. Rencana Kerja (Renja)	
3. Pengukuran Kinerja (PK)	
4. Perjanjian Kinerja (PK)	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

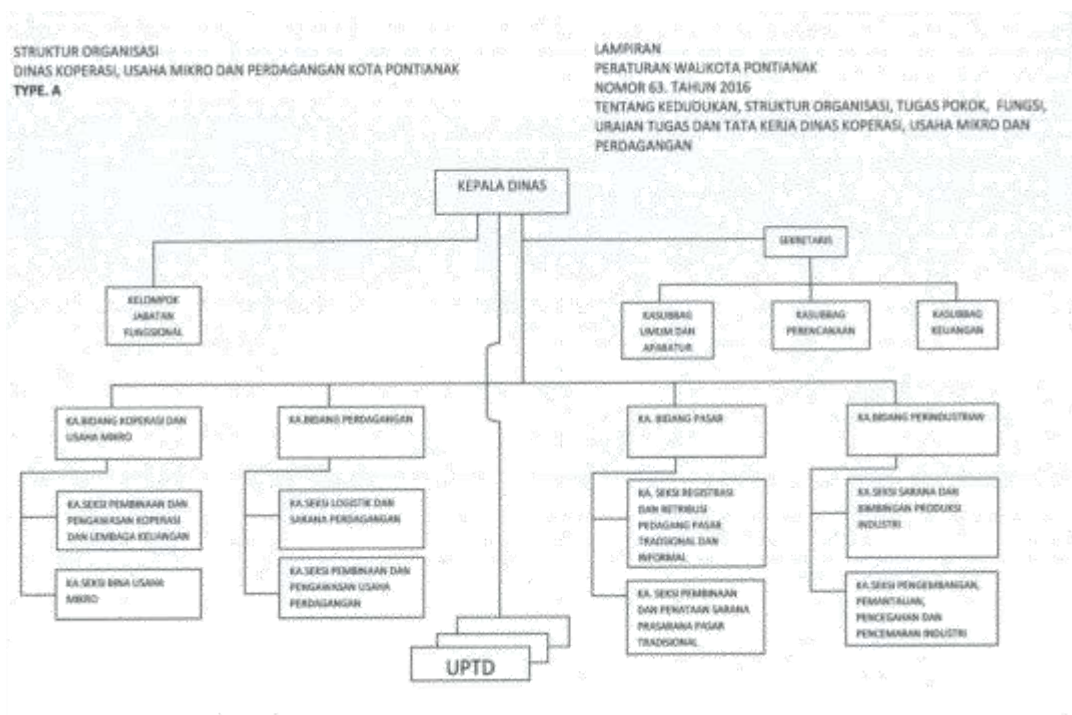
1. Pendahuluan

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satu diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 guna mencapai visi dan melaksanakan misi dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi , serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi **stakeholders** demi perbaikan kinerja instansi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan . Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan , Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan , dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi .

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi mengacu kepada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 22 Tahun 2010 pasal 2 tanggal 3 Maret 2010 terdiri dari 1 unit eselon 2b, 1 unit eselon 3a dan 4 unit eselon 3b , 3 unit UPTD dan Kelompok fungsional. Dengan komposisi sebagai berikut :



3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, Uraian tugas dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;



- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Tugas pokok masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas** dengan tugas : memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.
2. **Sekretaris Dinas**, dengan tugas : merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.
 - 2.1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur** dengan tugas: merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.
 - 2.3 **Kepala Sub Bagian Perencanaan** dengan tugas : merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan
 - 2.4. **Kepala Sub Bagian Keuangan** dengan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Keuangan.



3. **Bidang Koperasi dan Usaha Mikro** dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha mikro.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Lembaga Keuangan.

Seksi Bina Usaha Mikro dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang bina usaha mikro.

4. **Bidang Perdagangan** dengan tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perdagangan.

Seksi Logistik dan Sarana Perdagangan dengan tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang logistik dan sarana perdagangan.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perdagangan.

5. **Bidang Pasar** dengan tugas pokok: merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pasar

Seksi Registrasi dan Retribusi Pedagang Pasar Tradisional dan Informal dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang registrasi dan retribusi pedagang pasar tradisional dan informal.

Seksi Pembinaan dan Penataan Sarana Prasarana Pasar Tradisional dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pembinaan dan penataan sarana prasarana pasar tradisional.





6. **Bidang Perindustrian** dengan tugas pokok: menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang industri.

Seksi Sarana dan Bimbingan Produksi Industri dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang sarana dan bimbingan produksi industri.

Seksi Pengembangan, Pemantauan, Pencegahan dan Pencemaran Industri dengan tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pengembangan, pemantauan, pencegahan dan pencemaran industri.

Unit pelaksana teknis :

UPT Metrologi legal

UPT Jasa Usaha Pasar

UPT Pasar Tradisional

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada tahun 2020 didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 62 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Pembina Utama Muda /IVc	2	-	2
2	Pembina Tk. I /IVb	-	-	-
3	Pembina /IVa	5	1	6
4	Penata Tk I/IIId	4	7	11
5	Penata /IIId	4	5	9
6	Penata Tk I/IIb	2	9	11
7	Penata Muda/IIa	6	2	8
8	Pengatur Tk I/IIId	4	2	6
9	Pengatur/IIc	3	2	5
10	Pengatur Muda Tk I /IIb	1	-	1
11	Pengatur Muda/IIa	-	-	-
JUMLAH		31	28	59





Tabel 1.2. Jumlah Pegawai dari Segi Pendidikan Formal

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	S2	6	3	9
2	S1	9	14	23
3	D3	3	3	6
4	SMU	13	8	21
JUMLAH		31	28	59

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai dari Segi Jabatan Struktural / Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JABATAN	JUMLAH
1	II B	Kepala Dinas	1
2	III A	Sekretaris	1
3	III B	Kepala Bidang	4
4	IV A	Kepala Seksi/UPTD	14
5	IV B	Ka Sub Bag TU UPTD	3
JUMLAH			23

Tabel 1.4. Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal dari Tahun 2013 s/d 2020

No	Tingkat Pendidikan	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tamatan S-2	7	8	7	7	10	10	9	9
2	Tamatan S-1	20	20	24	24	25	22	25	23
3	Tamatan D-III	4	3	4	4	7	7	6	6
4	Tamatan SLTA/ sederajat	21	20	23	23	31	32	25	21
5	Tamatan SLTP/ sederajat	4	3	2	2	1	1	-	-
6	Tamatan SD/ sederajat	1	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		68	64	57	55	60	72	65	59

Tabel 1.5. Perkembangan Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan dari Tahun 2013 s/d 2020

No.	Golongan	Tahun							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Golongan IV	7	6	8	8	10	10	10	8
2	Golongan III	34	35	39	39	45	42	42	39
3	Golongan II	16	14	13	13	18	19	13	12
4	Golongan I	0	0	0	0	1	1	-	-

Sumber : subbag umum dan aparatur, DKUMP Kota Pontianak





Tabel 1.6. Jumlah Pegawai dari Segi Penempatan Kerja

GOLONGAN JENIS KELAMIN BIDANG	IV/c		IV/b		IV/a		III/d		III/c		III/b		III/a		II/d		II/c		II/b		II/a		JUMLAH
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Sekretariat	1	-	-	-	1	-	1	3	-	1	1	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	14
Industri	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Koperasi & UM	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Perdagangan	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	6
Pasar	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
UPT Pasar	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	7
UPT Jasa usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
UPT Metrologi	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4
JUMLAH	2	-	-	-	5	1	4	7	4	5	2	9	6	2	4	2	3	2	1	-	-	-	59

Dibandingkan dengan masing-masing urusan yang ditangani Jumlah pegawai dari segi penempatan kerja kurang memadai

Tabel 1.7. Perkembangan Jumlah Pegawai dari Tahun 2012 s/d 2020

No.	Tahun	Jumlah Pegawai
1	2012	57
2	2013	57
3	2014	58
4	2015	60
5	2016	61
6	2017	72
7	2018	71
8	2019	65
9	2020	59

Sumber : subbag umum dan aparatur, DKUMP Kota Pontianak

Perkembangan jumlah pegawai dari tahun 2012 s/d 2020 tidak mengalami penambahan yang signifikan dibandingkan dengan peningkatan urusan yang ditangani.

5. Sumber Daya Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang ditetapkan tahun 2020 berasal dari



APBD Kota Pontianak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.9.

Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Setelah perubahan)	REALISASI	%real
1	PENDAPATAN	3.053.820.000	3.305.727.600	108
	Retribusi pelayanan pasar	1.980.000.000	1.614.639.000	82
	retribusi pelayanan tera/tera ulang	100.000.000	246.333.100	246
	hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	973.820.000	1.444.755.500	148
	Jumlah Pendapatan	3.053.820.000	3.305.727.600	108
2	BELANJA			
	Belanja Operasi	16.788.309.822	15.299.703.756	91
	- Belanja Pegawai	10.637.581.040	9.364.364.177	88
	- Belanja Barang dan Jasa	6.150.728.782	5.935.339.579	96
	Belanja Modal	1.387.005.100	1.382.609.800	100
	- Belanja Tanah			
	- Belanja Peralatan dan Mesin	669.636.100	665.520.800	99
	- Belanja Gedung dan Bangunan	717.369.000	717.089.000	100
	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Belanja Aset Tetap Lainnya			
	- Belanja Aset Lainnya			
	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja	18.175.314.922	16.682.313.556	92
	Surplus / (Defisit)	-15.121.494.922	-13.376.585.956	88

6. Sarana dan Prasarana

Perkembangan Sarana Prasarana Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Gedung Kantor

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak saat ini memiliki sarana gedung kantor sebanyak 1 unit. Kegiatan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada kantor yang terletak di Jalan Aliyang No. 7C Pontianak (Kantor Pusat III Pemkot Pontianak) yaitu diperuntukkan Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Koperasi & Usaha Mikro, UPTD Pasar Tradisional, UPTD Jasa Usaha Pasar. Mulai Juni 2018 UPT Metrologi Legal



menempati Gedung Pengalihan eks Unit Pelayanan Kemetrollogian Kota Pontianak di Jalan Gusti Sulung Lelanang No.1 dan Instalasi Tangki Umur Mobil yang bertempat di Jl. Khatulistiwa serta Gedung UMKM mulai beroperasi Tahun 2020 difungsikan untuk mempromosikan produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah Kota Pontianak.

2. Kendaraan

Kendaraan dinas operasional yang tersedia, yaitu :

- 1) Kendaraan Roda Dua = 7 unit
- 2) Kendaraan Roda Empat = 3 unit
- 3) Kendaraan Roda Tiga = 1 Unit

3. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor lainnya

Sedangkan perkembangan sarana pendukung Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2020 dapat dilihat pada pada tabel Kartu Inventaris Barang (KIB) dan diakses melalui website Pemerintah Kota Pontianak sistem e-aplikasi SIMBADA.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melaksanakan urusan wajib Koperasi dan Usaha Mikro, urusan pilihan Perindustrian dan perdagangan mempunyai peran yang strategis sebagaimana tertuang dalam RJPMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing. Dengan sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak antara lain meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, terkendalnya inflasi serta meningkatnya jumlah koperasi usaha mikro yang berkualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi untuk mencapai sasaran strategis, adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Konsumen Kota Pontianak masih dihadapkan pada kurang tersedianya SDM yang memiliki kompetensi untuk pengawasan barang dan jasa misalnya Petugas Pengawas Barang dan





- Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), PPNS Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penyebab lainnya adalah belum operasionalnya lembaga/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), masih rendahnya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang bijaksana dan pintar, sehingga mau pro-aktif memberikan pengaduan indikasi / kemungkinan pelanggaran hak-hak konsumen baik dalam memperoleh barang dan jasa.
2. Dengan penyerahan Metrologi legal kepada Pemerintah Kota Pontianak sehingga pelayanan tertib UTTP perlu peralatan, SDM yang kompeten, anggaran operasional yang memadai, sehingga investasi ke peralatan, peningkatan SDM, dan biaya akreditasi dalam jangka menengah diperlukan untuk mempersiapkan laboratorium yang terakreditasi dan bersaing dengan laboratorium sejenis.
 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak, Tahun 2025 menuju Pontianak Kota Khatulistiwa yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa berwawasan Lingkungan, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA/EAC) 2015, dan berlakunya Asean Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada tahun 2010 merupakan tantangan bagi OPD yang menangani sektor Perdagangan, Industri dan Koperasi dan Usaha Mikro untuk merevitalisasi industri berstruktur kuat, peningkatan daya saing produk Koperasi dan Usaha Mikro dan penguatan serta pengamanan perdagangan.
 4. Tingkat kesadaran pedagang untuk menjaga kebersihan lingkungan pasar, manajemen pengelolaan pasar belum profesional, merupakan tantangan tersendiri untuk mewujudkan pasar rakyat yang berSNI.
 5. Kondisi koperasi berkualitas berdasarkan Rapat Anggota Tahunan, Volume Usaha dan asset sebanyak 64 unit dari jumlah koperasi yang ada 519 unit masih rendah, Usaha Mikro Kecil Menengah mencapai 90,74% untuk skala usaha sulit berkembang, SDM pengelola Koperasi dan UMKM yang rendah, kurang pemahaman pengurus, pengelola





maupun anggota koperasi tentang perkoperasian, kepastian berusaha, akses pada sumber daya produktif rendah merupakan tantangan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Belum optimalnya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan Usaha mikro.
7. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Industri, Perdagangan, Pasar juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, kesenjangan antar kawasan (wilayah Pontianak utara dengan jumlah RTM sebesar 5.466 rumah tangga, Pontianak Timur dengan jumlah RTM sebesar 4.271 rumah tangga dan Pontianak barat dengan jumlah RTM sebesar 3.737 rumah tangga).

C. Sistematika Laporan

Adapun Sistematika laporan terdiri dari :

a. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menggambarkan seluruh komponen LaKIP dimulai tujuan, sasaran dan hasil capaian, kendala-kendala, serta, langkah-langkah pengendaliannya.

b. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini komponen yang tergambar penjelasan umum organisasi, dengan pendekatan kepada efek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

c. Bab II. Perencanaan Kinerja

Titik fokus pada bab ini menggambarkan tentang rencana Strategis dan penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.





d. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja memfokuskan pada pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama, analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan program kegiatan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020.

e. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan instansi teknis yang bertugas membantu Walikota melaksanakan visi dan misinya dalam kurun waktu 2020 - 2024 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi.

Titik berat pembangunan bidang ekonomi urusan wajib Koperasi dan UKM dan urusan pilihan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam RJPMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing. Dengan sasaran strategis yang terkait langsung dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak antara lain meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB, terkendalinya inflasi serta meningkatnya jumlah koperasi usaha mikro yang berkualitas.

Adapun tujuan strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
2. Meningkatkan pelaku ekspor dan impor yang dibina
3. Meningkatkan Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar
4. Meningkatkan Industri Kecil Menengah dan Industri Kreatif
5. Meningkatkan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)
6. Meningkatkan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka
7. Meningkatkan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
8. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM Meningkatkan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
9. Meningkatkan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah





10. Meningkatkan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
11. Meningkatkan Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak menyusun indikator prioritas sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya sektor perdagangan dalam negeri, indikator yang ingin dicapai adalah **Kontribusi Sektor perdagangan dalam negeri.**

Tujuan 2 : Meningkatnya sektor industri. Indikator yang ingin dicapai adalah **Kontribusi sektor industri terhadap PDRB.**

Tujuan 3 : Meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro. Indikator yang ingin dicapai adalah **Kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap PDRB.**

Tujuan strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan dicapai melalui 12 (dua belas) program yang akan dilaksanakan masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun 12 (dua belas) program prioritas dimaksud yaitu :

PROGRAM PRIORITAS

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM
5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima



6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
7. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional
8. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
10. Pengembangan IKM dan Industri Kreatif
11. Pengembangan Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan (IKAHH)
12. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

B. PERJANJIAN DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja merupakan suatu dokumen kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020, perubahannya, serta kelengkapan dokumen perencanaan lainnya dijabarkan Rincian Jenis Pengeluaran Per Kegiatan, Tolok Ukur dan Uraian Pengeluaran, Lembaran Kerja, Petunjuk Operasional, Rencana Pengeluaran Keuangan Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, serta Petunjuk Khusus lainnya. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan tujuan strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatkan **Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu :

Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar. Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, terdiri dari kegiatan:



1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output berupa Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia dan target 6 pasar. Alokasi anggaran sebesar Rp.577.325.040,-.
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output berupa Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan dan target 17 pasar. Alokasi anggaran sebesar Rp.1.347.172.000,-.
 2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan sub kegiatan:
 - a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output Jumlah pasar rakyat yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar dan target 23 pasar. Alokasi anggaran Rp. 26.098.000,-.
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator output Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan dan target 23 pasar. Alokasi anggaran sebesar Rp. 134.450.000,-.
2. Sasaran **Terkendalinya Laju Inflasi** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu :
- Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan**, Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 3 (tiga) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :
- a. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, terdiri dari kegiatan :



- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan :
 - ❖ Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dengan output Jangka waktu pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.900.000,-.
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan :
 - ❖ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan dengan indikator output jangka waktu pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 62.744.450,-.
 - ❖ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) dengan indikator output Jumlah Operasi Pasar dan target 1 kali. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.144.000,-.
3. Sasaran **Meningkatnya Volume usaha Ekspor** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu :
- Volume Ekspor (ton),** Indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :
- a. Program Pengembangan Ekspor



- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan :
 - ❖ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten / Kota dengan indikator output Jumlah Pelaku usaha yang dibina dan target 75 Usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 32.674.769,-.
- 4. Sasaran **Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:
Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :
 - a. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan indikator output Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal dan target 12 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 360.323.690,-.
- 5. Sasaran **Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:
Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :
 - i. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub kegiatan :



- ❖ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan indikator output umlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan target 1 kali. Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.350.100,-.

6. Sasaran **Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan

- ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan indikator output Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri dan target 12 bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 40.905.030,-.
- ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan indikator output Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan dan target 40 produk. Alokasi anggaran Rp.232.437.500,-.
- ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan indikator output Jumlah Industri yang diberdayakan dan target 8 industri. Alokasi anggaran sebesar Rp.77.690.000,-.
- ❖ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator output





Jumlah Industri yang dilatih dan target 25 industri. Alokasi anggaran sebesar Rp.54.604.352,-.

7. Sasaran **Meningkatnya kelayakan perijinan industri** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan indikator output Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.201.000,-.

8. Sasaran **Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase pertumbuhan industri, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan serta 1 (satu) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :



- ❖ Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan indikator output Jangka waktu fasilitasi/pemenuhan Komitmen Perolehan IUI dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.439.600,-.

9. Sasaran **Meningkatnya Koperasi yang Aktif** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase koperasi aktif, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) Program dan 5 (lima) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- ❖ Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.760.100,-.

b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:
- ❖ Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran Rp. 35.616.000,-.



- ❖ Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran Rp. 19.880.802,-.
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - ❖ Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dan target 12 Bulan. Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.668.091,-.
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - ❖ Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan indikator output Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk Koperasi dan target 160 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 394.448.639,-.
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
 - ❖ Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator output Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan dan target 40 unit. Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.823.091,-.



10. Sasaran **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro** dengan indikator kinerja utama sasaran yaitu:

Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru, indikator ini dicapai melalui pelaksanaan 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan serta 2 (dua) sub kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (output) serta anggaran sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)

➤ Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan :

❖ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan indikator output jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dan target 40 usaha. Alokasi anggaran sebesar Rp. 231.000.000,-.

b. Program Pengembangan Umkm

➤ Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

❖ Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) dengan indikator output Jumlah barang beredar yang diawasi dan target 12 item. Alokasi anggaran sebesar Rp. 75.019.752,-.

TABEL II.1
KETERKAITAN MISI, TUJUAN, SASARAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN TAHUN 2020 – 2024





MISI/ TUJUAN	MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG MANDIRI, KREATIF DAN BERDAYA SAING
SASARAN STRATEGIS 1	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar
SASARAN STRATEGIS 2	Terkendalnya Laju Inflasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan
SASARAN STRATEGIS 3	Meningkatnya Volume usaha Ekspor
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Volume Ekspor (ton)
SASARAN STRATEGIS 4	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti
SASARAN STRATEGIS 5	Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
SASARAN STRATEGIS 6	Meningkatnya sarana prasarana klaster Industri
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri
SASARAN STRATEGIS 7	Meningkatnya kelayakan perijinan industri
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan
SASARAN STRATEGIS 8	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase pertumbuhan industri
SASARAN STRATEGIS 9	Meningkatnya Koperasi yang Aktif
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase koperasi aktif
SASARAN STRATEGIS 10	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja berdasarkan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 dengan realisasinya.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2020 mencakup 7(tujuh) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2020 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2020 dengan Standar Nasional
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.





6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Instansi Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing - masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	= Berhasil
$55 < X \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing - masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata - Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran dengan "**Metode Rata- Rata Data Kelompok**" adalah



penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata - rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai mean setiap kategori adalah sebagai berikut :

Nilai Mean (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.**

Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam table sebagai berikut :

TABEL III.1

Tingkat capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Terkait Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak





Sasaran strategis 2: Meningkatkan sektor perdagangan						
Indikator : Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB						
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Tahun 2020	SKALA PENGUKURAN ORDINAL				KATEGORI CAPAIAN
		X > 85	70 < X ≤ 85	55 < X ≤ 70	X ≤ 55	
Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	100%					SANGAT BERHASIL
Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%					SANGAT BERHASIL
Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina)	100%					SANGAT BERHASIL
Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100%					SANGAT BERHASIL
NILAI MEAN	103%					SANGAT BERHASIL
Sasaran strategis 3: Meningkatkan sektor perindustrian						
Indikator : Kontribusi sektor industri terhadap PDRB						
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Tahun 2020	SKALA PENGUKURAN ORDINAL				KATEGORI CAPAIAN
		X > 85	70 < X ≤ 85	55 < X ≤ 70	X ≤ 55	
persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	100%					SANGAT BERHASIL
Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	100%					
Persentase pertumbuhan industri	100%					SANGAT BERHASIL
NILAI MEAN	100%					SANGAT BERHASIL
NILAI KESELURUHAN	102%					SANGAT BERHASIL
Sasaran strategis 4: Meningkatkan daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro						
Indikator : 1. Persentase Koperasi yang berkualitas 2. Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha						
INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Tahun 2020	SKALA PENGUKURAN ORDINAL				KATEGORI CAPAIAN
		X > 85	70 < X ≤ 85	55 < X ≤ 70	X ≤ 55	
persentase koperasi aktif	105%					SANGAT BERHASIL
Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	100%					SANGAT BERHASIL
NILAI MEAN	100%					SANGAT BERHASIL
NILAI KESELURUHAN	102%					SANGAT BERHASIL

Dari tabel diatas jumlah keseluruhan indikator sasaran sebanyak 5 (lima) sasaran yang dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**. Dengan Pencapaian Indikator sasaran adalah **100%**.

Untuk setiap sasaran Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.



ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Adapun Pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang mendukung 2 (dua) sasaran Pemerintah Kota Pontianak dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak terkait Tujuan ke-4 (empat) sasaran strategis Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 yaitu Meningkatnya Sektor Perdagangan, dengan Indikator utama Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, Meningkatnya Sektor Industri, dengan indikator utama yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dan Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro dengan Indikator Utama yaitu : Persentase Koperasi yang Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha, secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.2 sebagai berikut

Tabel. III.2
Capaian Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Perdagangan terkait Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pontianak
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan	• Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	14.61%	17.88%
2	Meningkatnya Sektor Industri	• Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	16.17%	17.41%
3	Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	• Persentase Koperasi yang Berkualitas • Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	4.00% 100%	12.33% 100%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

Dari tabel III.2 penjelasan pencapaian indikator berikut ini :





1) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Berdasarkan data statistik Kota Pontianak dalam Angka Tahun 2020 Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 adalah sebesar 17.88%. Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 16 persen. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 6.52 triliun rupiah atau sekitar 16,78 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 58.48 persen merupakan sumbangan dari subkategori perdagangan besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 41,51 persen merupakan sumbangan dari subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Secara umum, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor cenderung menurun selama periode 2015-2019. Laju pertumbuhan sebesar 5,79 persen di tahun 2017 menurun menjadi 4,47 di tahun 2019. Salah satu penyebabnya adalah masih belum membaiknya perekonomian di kabupaten sekitar Kota Pontianak yang berpengaruh pada kategori ini.

Capaian Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari target 14,61% terealisasi 17,88% atau terealisasi 122% dan masuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil** ” . Untuk merealisasikan capaian indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 4 (empat) program :

1. Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional, dengan indikator kinerja program adalah :
 - ☞ Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar
2. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, dengan indikator kinerja program adalah :
 - ☞ Persentase pelaku ekspor yang dibina
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan indikator kinerja program adalah :
 - ☞ Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan
4. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, dengan indikator kinerja program adalah :





- ☞ Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindaklanjuti.

Persentase capaian sasaran dari program yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Capaian persentase pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI Pasar tahun 2020 dari target 5.88% terealisasi 5.88% atau 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Dengan disahkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, istilah pasar Tradisional berubah penyebutannya menjadi pasar rakyat. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar. Pasar rakyat merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, diantaranya : (1) simpul kekuatan ekonomi lokal; (2) memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; (3) meningkatkan kesempatan kerja; (4) menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah; (5) menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; (6) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); (7) sebagai salah satu sarana keberlanjutan budaya setempat; serta (8) merupakan hulu sekaligus muara dari perekonomian informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah Ketentuan dan persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang harus dimiliki oleh Pasar Rakyat. Pada Tahun 2020 pasar rakyat yang memenuhi pasar rakyat berSNI Tipe I (satu) adalah Pasar Flamboyan dengan persentase pemenuhan sebesar 66 persen atau 29 item dari 44 item syarat SNI, Tipe III(tiga) adalah Pasar Teratai dengan persentase 71 persen atau 29 item dari 41 item syarat SNI, dan Tipe IV (empat) adalah Pasar Kemuning





dengan persentase pemenuhan 74 persen atau 28 item dari 38 item syarat SNI. Persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan untuk setiap tipe pasar rakyat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
1.	Jumlah pedagang terdaftar	>750 orang	500 – 750 orang	250 – 500 orang	< 250 orang
Persyaratan Teknis					
2.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 M ²	Minimal 2 M ²	Minimal 2 M ²	Minimal 1 M ²
3.	Jumlah Pos Ukur Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos
4.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan Kering • Siap Saji • Non Pangan • Tempat pemotongan unggas hidup	• Pangan basah • Pangan Kering • Siap Saji • Non Pangan • Tempat pemotongan unggas hidup	• Pangan basah • Pangan Kering • Siap Saji • Non Pangan • Tempat pemotongan unggas hidup	• Pangan basah • Pangan Kering • Siap Saji • Non Pangan • Tempat pemotongan unggas hidup
5.	Area Parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar
6.	Area bongkat muat barang	Tersedia khusus	Tersedia khusus	Ada	Ada
7.	Akses untuk masuk keluar kendaraan	Terpisah	Terpisah	Ada	ada
8.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,8 M	Minimal 1,8 M	Minimal 1,5 M	Minimal 1,2 M
9.	Kantor pengelola	Di dalam lokasi pasar	Di dalam lokasi pasar	Di dalam lokasi pasar	Ada
10.	Lokasi toilet dan Kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda
11.	Jumlah toilet pada satu lokasi	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 2 toilet pria dan 2 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita
12.	Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah/lemari pendingin	ada	ada	--	--
13.	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada 4 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 3 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda
14.	Ruang Menyusui	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	Ada	ada
15.	CCTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi	---
16.	Ruang peribatan	Minimal 2 ruang	Minimal 1 ruang	Minimal 1 ruang	ada
17.	Ruang bersama	ada	ada	Ada	---



18.	Pos kesehatan	ada	ada	Ada	ada
19.	Pos Keamanan	ada	ada	Ada	ada
20.	Area Merokok	ada	ada	Ada	ada
No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
21.	Ruang disinfektan	ada	ada	Ada	---
22.	Area Penghijauan	ada	ada	Ada	ada
23.	Tinggi anak tangga (untuk pasar dengan 2 lantai)	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm	Maksimal 18 cm
24.	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai, di zona pangan	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm
25.	Akses untuk kursi roda	ada	ada	---	---
26.	Jalur evakuasi	ada	ada	Ada	ada
27.	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	Ada	ada
28.	Hidran air	ada	ada	---	---
29.	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
30.	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
31.	Ketersediaan tempat sampah	- Setiap toko / kios /los / jongko /konter / pelataran - Setiap fasilitas pasa	- Setiap toko / kios /los / jongko /konter / pelataran - Setiap fasilitas pasa	- Setiap toko / kios /los / jongko /konter / pelataran - Setiap fasilitas pasa	- Setiap toko / kios /los / jongko /konter / pelataran - Setiap fasilitas pasa
32.	Alat angkut sampah	ada	ada	Ada	ada
33.	Tempat Pembuangan sampah sementara	ada	ada	Ada	ada
34.	Pengelolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	Ada	ada
35.	Sarana telekomunikasi	ada	ada	Ada	ada
Persyaratan Pengelolaan					
36.	Informasi identitas pedagang	ada	ada	Ada	ada
37.	Informasi kisaran harga	ada	ada	Ada	ada
38.	Informasi zonasi pasar	ada	ada	Ada	ada
39.	Prosedur Kerja/SOP	ada	ada	Ada	ada
40.	Struktur Pengelola	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan keuangan, - Bidang ketertiban dan keamanan - Bidang	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan keuangan, pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas	- Kepala Pasar, - Bidang Administrasi dan keuangan, pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas	- Kepala Pasar, - Administrasi keuangan, pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas - Bidang



		pemeliharaan dan kebersihan, • Bidang pelayanan pelanggan dan pengembangan komunitas.	• Bidang ketertiban dan keamanan • Bidang pemeliharaan dan kebersihan,	• Bidang ketertiban, keamanan, pemeliharaan dan kebersihan,	ketertiban, keamanan, pemeliharaan dan kebersihan.
41.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang
42.	Pelaksanaan sidang tera/tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun
43.	Program pengembangan dan aktivasi pasar	ada	ada	Ada	ada
44.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	ada	Ada	ada

2. Capaian Persentase pelaku ekspor yang dibina tahun 2020 dari target 4% terealisasi 4% atau 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Pelaku ekspor dan impor Tahun 2020 sebanyak 84 pelaku usaha dan sebanyak 7 pelaku usaha yang atau 8%. Berikut data pelaku ekspor dan impor tahun 2020 di Kota Pontianak.



NO	NAMA PERUSAHAAN	NO	NAMA PERUSAHAAN
1	2	1	2
1	PT. INDOVITEX	43	CV. KAPUAS LESTARI
2	PT. PELAYARAN NIAGA SUKSES BERSAMA	44	PT. KAPUAS INTAN UTAMA
3	PT. PELAYARAN SURI ADIDAYA KAPUAS	45	PT. SINAR SUMBER SEHAT
4	PT. MARLIN KAPUAS BAHARI SHIPYARD	46	CV. MERCY ENTERPRISE
5	PT. PUNDI GLOBAL INVESTAMA	47	PT. TUJUAN UTAMA
6	PT. PUNDI LAHAN KHATULISTIWA	48	PT. GOLDRUSH INTERNATIONAL
7	PT. AGRO SENTRAL JAYA	49	PT. CEMERLANG ANDALAN NUSANTARA
8	PT. FAJAR TIRTA NATURAL	50	CV. KHATULISTIWA TEKNOLOGI
9	PT. FAJAR BAHARI NUSANTARA	51	PT. KOTA NIAGA RAYA
10	PT. ALAM SUBUR LESTARI	52	PT. CIPTA RASA SEJATI
11	PT. DUTA PERTIWI NUSANTARA	53	PT. JOSEPH TRESNA KARYA
12	PT. SUKSES KALIMANTAN STRUKTUR	54	PT. DELAPAN DELAPAN BERJAYA
13	CV. INTI PROFIL	55	PT. INTI KAPUAS INTERNASIONAL
14	PT. KARYA PRIMA KANVAS	56	PD. PONTI NELAYAN
15	CV. FAJAR BARU	57	PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA
16	PT. BUMI BORNEO CEMERLANG	58	PT. COCO JAYA LESTARI
17	PT. KOGELAHAR BORNEO	59	PT. BAJASARANA SEJAHTERA
18	PT. ERA LINTAS KHATULISTIWA	60	PT. BORNEO NAUFA PRAWIRA
19	PT. KAPUAS LINTAS UTAMA	61	PT. ENSAS PELITA USAHA
20	PT. PELAYARAN TONICOGITA EKAMARINDO	62	PT. HYDR SUKSES
21	PT. BUMI PERKASA GEMILANG	63	PT. CAHAYA PELANGI
22	CV. SINAR MUTIARA	64	PT. SUMBER HASIL SEMESTA
23	PT. PELAYARAN KAPUAS JATRATAMA	65	PT. ADIL MAKMUR JAYA
24	CV. ANUGERAH AGUNG	66	PT. SARAS BINTANG ABADI
25	PT. ANEKA MULTI SUKSES ABADI	67	PT. BHUMI SATU TERPADU
26	PT. PELAYARAN USAHA GAS ELPINDO	68	PT. TITIK SUKSES KHATULISTIWA INDONESIA
27	PT. DUTA INDO LESTARI	69	PT. MITRA ADIDAYA PERKASA
28	PT. SARI BERKAT GEMILANG	70	PT WAWASAN KEBUN NUSANTARA
29	PT. KAPUASINDO PALM INDUSTRY	71	PT. KALIMANTAN MINERALS PERSADA
30	CV. NOVI JAYA ABADI	72	PT. ARDA DEDALI SEJAHTERA
31	CV. AMAN JAYA	73	PT. KAPUAS BESAR
32	CV. PROPALM	74	PT. SUMBER ALAM
33	PT. SATRIA MULTI SUKSES	75	PT. SUMBER DJANTIN
34	CV. KURNIA PUTRA SEJATI	76	PT. UNO UTAMA INDONESIA
35	CV. MASCAYA	77	CV. MULTIAGRO SARANA CEMERLANG
36	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIII	78	CV. MAJU NUSA JAYA
37	CV. JAYA ABADI	79	PT. PELAYARAN SAHABAT KAPUAS
38	PT. AGUNG RODA MEGAH INDAH	80	PT. JASA PUTRA KHATULISTIWA
39	PT. ANUGERAH SENTOSA BARU	81	PT. PELAYARAN RIMBA MEGAH ARMADA
40	PT. PAKITA JAYA	82	PT. TITAN BORNEO
41	PT. GEMILANG ASIA SEJAHTERA	83	PT. ICHIKO AGRO LESTARI
42	PT. KAPUAS LESTARI	84	CV. SARAS BINTANG ABADI



3. Capaian Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan tahun 2020 dari target 100% terealisasi 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Persentase stok SEMBAKO di Kota Pontianak selama Tahun 2020 mencukupi. Perkembangan stok SEMBAKO bulan desember 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK								
RANGKUMAN STOK AWAL, PENGADAAN, PENYALURAN DAN STOK AKHIR								
KOMODITI BERAS DAN LAINNYA PERIODE TAHUN 2020								
BULAN : DESEMBER 2020								
NO	NAMA PERUSAHAAN	NAMA KOMODITI	SATUAN	STOK AWAL	PENGADAAN	PENYALURAN	STOK AKHIR	KETERANGAN
1	PD. MAHKOTA JAYA	BERAS	TON	145	110	120	135	
2	PT. WIJAYA SUMBER LESTARI	BERAS	TON	449	414	418	445	
3	ERA JAYA	BERAS	TON	389	535	515	409	
4	PD. BRANTAS	BERAS	TON	328	292	555	65	
5	CV. SUMBER INDAH LESTARI	BERAS	TON	86	105	91	100	
6	SENTOSA BARU 21	BERAS	TON	28	8	20	17	
7	UD. CAHAYA PANGAN	BERAS	TON	158	60	52	166	
8	CV. GEMILANG BINTANG UTAMA	BERAS	TON	160	325	323	162	
9	CV. SERAYOE	BERAS	TON	189	464	502	151	
10	SETIA MANDIRI	BERAS	TON	80	125	125	80	
11	LESTARI MENTARI MAKMUR	BERAS	TON	75	120	100	95	
12	KHATULISTIWA JAYA	BERAS	TON	270	240	280	230	
13	AGRO ABADI	BERAS	TON	4.554	1.246	1.592	4.208	
14	CV. DUNIA KHATULISTIWA	BERAS	TON	32	130	106	56	
15	PT. LESTARI NIAGA KHATULISTIWA	BERAS	TON	218	9	31	196	
16	SENTOSA BARU	BERAS	TON	50	50	40	60	
17	CV. BUNAKEN	BERAS	TON	3	5	6	2	
18	TUNAS BARU	BERAS	TON	110	80	90	100	
19	CV. MAKMUR BERSAUDARA	BERAS	TON	348	575	370	552	
20	CV. DUTA UTAMA ADITYA	BERAS	TON	234	907	946	195	
21	PT. DUTA PANGAN MANDIRI	BERAS	TON	234	907	946	195	
	TOTAL	BERAS	TON	8.140	6.707	7.227	7.620	
	KAPUAS LESTARI	KEDELAI	TON	1.513	716	835	1.394	
	BOGASARI	TEPUNG	TON	-	-	-	-	
	CV. BUNAKEN	TEPUNG	TON	7	27	27	7	
	TOTAL	TEPUNG	TON	7	27	27	7	
	AGRO ABADI	GULA	TON	76,25	345,75	350,45	71,55	
	SENTOSA BARU	GULA	TON	2.030	1.200	1.350	1.880	
	CV. BUNAKEN	GULA	TON	22	9	21	9	
	TOTAL	GULA	TON	2.128	1.554	1.721	1.961	
	CV. DUNIA KHATULISTIWA	MINYAK GORENG	Ltr	18.100	26.000	26.300	17.800	
	PT. LESTARI NIAGA KHATULISTIWA	MINYAK GORENG	LTR	40.745	305.556	225.288	121.013	
	PD. HERO	MINYAK GORENG	LITER	143.100	208.800	222.300	129.600	
	TOTAL	MINYAK GORENG	LITER	201.945	540.356	473.888	268.413	
	KHATULISTIWA JAYA	KACANG HIJAU	TON	30	35	55	10	
	KHATULISTIWA JAYA	BAWANG PUTIH	TON	75	55	65	65	
	DWI SENTOSA	BAWANG PUTIH	TON	9	8	17	-	
	TOTAL	BAWANG PUTIH	TON	84	63	82	65	
	KHATULISTIWA JAYA	KEMIRI	TON	-	5	4	1	
	KHATULISTIWA JAYA	KACANG TANAH	TON	10	35	30	15	
	KHATULISTIWA JAYA	BAWANG MERAH	TON	20	70	60	30	
	DWI SENTOSA	BAWANG MERAH	TON	4	16	18	2	
	TOTAL	BAWANG MERAH	TON	24	86	78	32	

4. Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindaklanjuti tahun 2020 dari target 100% terealisasi 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Pengawasan barang beredar Tahun 2020 dilaksanakan pada perizinan minuman beralkohol di Hotel yang ada di Kota Pontianak, Pengawasan terhadap komoditi sembako di Pergudangan, Pengawasan barang beredar di pasar



modern, Pengawasan produk yang urgen yaitu Tabung Gas LPG 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg di Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Usaha Laundry, Pengawasan Produk makanan dan minuman di pasar modern, dan Pengawasan usaha perdagangan di kota Pontianak.

2) Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

Berdasarkan data statistik Kota Pontianak dalam Angka Tahun 2020 Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 adalah sebesar 17.41%. Pada kategori industri pengolahan penyumbang terbesar di tahun 2019 adalah industri makanan dan minuman mencapai 3,97 triliun rupiah atau sebesar 65,70 persen. Berikutnya industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 13,05 persen; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 8,24 persen; dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 5,92 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari lima persen.

Capaian Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB dari target 16,17% terealisasi 17,41% atau terealisasi 108% dan masuk dalam kategori “ **Sangat Berhasil**” . Untuk merealisasikan capaian indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 3 (tiga) program :

1. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dengan indikator kinerja program adalah : persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri.
2. Program Pengembangan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH), dengan indikator kinerja program adalah : Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan.
3. Pengembangan IKM dan Industri Kreatif, dengan indikator kinerja program adalah : persentase pertumbuhan industri.

Persentase capaian sasaran dari program yang dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :





1. Capaian persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster industri tahun 2020 dari target 25% terealisasi 25 % atau 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Perkembangan klaster industri di masa pandemi covid-19 stagnan. Klaster yang masih ada di kota Pontianak kampung tenun, batik kamboja dan klaster akar keladi air, kampung caping mendawai. Sarana prasarana klaster industri yang ditingkatkan berdasarkan permintaan kebutuhan di setiap kelurahan seKota Pontianak.
2. Capaian Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan tahun 2020 dari target 90% terealisasi 90 % atau 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Berdasarkan Monitoring Kelayakan perizinan industri Tahun 2020 yang dilakukan terhadap 46 industri, terdapat 41 industri yang memenuhi kelayakan perizinan atau 91%. Monitoring yang dilakukan pada jumlah penerbitan izin usaha dan keakuratan data.
3. Capaian persentase pertumbuhan industri tahun 2020 dari target 2,09% terealisasi 3 % atau 100% masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Persentase pertumbuhan industri tahun 2020 meningkat karena masa pandemi virus covid 19 membuat masyarakat yang terdampak mengalihkan usaha sebagai pekerja atau karyawan kepada kegiatan produksi yaitu usaha kuliner dan sektor industri lainnya.

3) persentase koperasi yang berkualitas

Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Tahun 2020 Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Aset sebanyak 64 unit koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 519 unit atau





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

sebesar 12,33 Persen. Capaian koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Aset dari target 4.00% tercapai 12,33% atau 308% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Adapun koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Aset adalah sebagai berikut :

NO	IDKOP	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	AKTIF	JENIS KOPERASI
1	6171010011004	Koperasi Karyawan Listrik Negara Karlina	1161/BH/X	23/04/1986	Jl. Jenderal Ahmad Yani No 25	Akcaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
2	6171010011106	Koperasi Karyawan YKIA	80/BH/X	19/09/2003	Jalan Jendral A Yani No.05	Akcaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
3	6171010011142	Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera SMK N 5	1173.a/BH/X.7	23/09/1986	Jl. A Yani No.4	Akcaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
4	6171010011324	Koperasi Pegawai Negeri Usaha Asih	1228/BH/IX	14/10/1987	Jl. Kalimantan No. 123	Akcaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
5	6171010050003	Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wat-Tamwil Mujahidin	24/BH/X	11/02/2002	Jalan Ahmad Yani Komplek Masjid Raya Mujahidin	Akcaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
6	6171010050005	Koperasi Serba Usaha Kurnia	104/BH/X	25/09/1995	Jalan Johan Idrus No 1	Akcaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
7	6171010020001	Koperasi Fajar Lestari Kusuma	156/BH/XVII.10	14/04/2016	Jl. Pahlawan No. 41-42	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	TRUE	Jasa
8	6171010030093	Koperasi Karyawan Batara Khatulistiwa (PT.BPN)	1498/BH/X	15/12/1993	Jl. Gajah Mada	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
9	6171010020139	Koperasi Pegawai Negeri Pigur SMKN 3	1117/BH/X	31/01/1985	Jl. Jenderal S. Parman	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
10	6171010050011	Primer Koperasi Kartika Pontianak jaya	692/BH/X	06/11/1996	Jl. Gusti Sulung Lelanang no 45 Pontianak	Benua Melayu Darat	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
11	6171010030097	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN TIRTA DHARMA	942/BH/X TAHUN 2006	14/08/2006	Jl. Imam Bonjol No.430	Benua Melayu Laut	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
12	6171010020062	Koperasi Karyawan Sinar Khatulistiwa	127/BH/XVII.10 Tahun 2012	03/03/2012	Jl. Karya Baru No. 60	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	TRUE	Jasa
13	6171050020001	Koperasi Serba Usaha Wredatama Kota Pontianak	63/BH/KDK/147/X/1998	24/11/1998	Jl. Sutoyo Pontianak	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	TRUE	Jasa
14	6171010011016	Koperasi Serba Usaha Husada Makmur	98/BH/XVII.10 Tahun 2010	14/04/2010	Jl. A Yani (Dinas Kesehatan Kota Pontianak)	Parit Tokaya	Pontianak Selatan	TRUE	Konsumen
15	6171010060026	KOPERASI SIMPAN PINJAM SAHABAT SEJAHTERA	1323/BH/X	26/10/2009	Jalan Ahmad Yani Gang Sepakat II Komplek Ruko Sepakat Indah Residence Nomor 04, kelurahan Bansir darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Bangka Belitung	Pontianak Selatan	TRUE	Simpan Pinjam
16	6171020050024	Koperasi Pegawai Negeri Bunga Bangsa SLTP 14	39/BH/X	14/05/2002	Jl. Tani I	Saigon	Pontianak Timur	TRUE	Konsumen
17	6171020070062	Koperasi Wanita Maju Dalam Usaha Maju Dalam Keluarga	78/BH/XVII.10	12/01/2008	Jl. Tritura Gg. Karya Sepakat No.1 Rt.02/Rw.02	Tanjung Hilir	Pontianak Timur	TRUE	Konsumen
18	6171020080015	Koperasi Serba Usaha BMT Basmallah Arrafi ul a laa	135/BH/X	17/03/2005	Jl. H. Rasuna Said Perumnas III	Tanjung Hulu	Pontianak Timur	TRUE	Konsumen
19	6171020080132	Koperasi Serba Usaha Dana Kapuas	27/BH/XVIII.10	01/12/2008	Jl. Panglima Aim No.76	Tanjung Hulu	Pontianak Timur	TRUE	Konsumen
20	6171030020002	Koperasi Pegawai Negeri Berdikari SMP Negeri 17 Pontianak	1532/BH/X	13/12/1994	Jl. Tabrani Ahmad	Pal Lima	Pontianak Barat	TRUE	Konsumen
21	6171030020005	Koperasi Serba Usaha Mulia Harta	104/BH/X/XVII.10/Tahun 2010	17/09/2010	Jl. H.Hamzah Komp. Fajar Kencana I Blok A13 Rt.03/RW.01	Pal Lima	Pontianak Barat	TRUE	Jasa
22	6171030030001	KPN Pegas SMKN 4	1527/BH/X	08/10/1994	Jalan Komyo Sudarso	Sungai Belitung	Pontianak Barat	TRUE	Konsumen
23	6171030040002	KOPERASI SIMPAN PINJAM ADIL MAKMUR	145/KEP/BH/KU K-UKM/2004	01/12/2004	Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 84	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat	TRUE	Simpan Pinjam
24	6171030040003	KOPERASI PEGAWAI NEGERI ABADI	78/BH/X	01/11/1990	Jalan H. Rais A. Rahman Gg. Lawu	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat	TRUE	Konsumen
25	6171030040006	KOPERASI KONSUMEN PONTA SEJAHTERA BERSAMA	1395/BH/XVII.10 II/2015	07/12/2015	JALAN TABRANI AHMAD NOMOR 3	Sungai Jawi Dalam	Pontianak Barat	TRUE	Konsumen
26	6171030050136	Kopermas Borneo Sejahtera	124/KEP/BH/KU-UKM/2004	19/05/2004	Jl. RE Martadinata Komp Ruko Marta Indah Blok D5	Sungai Jawi Luar	Pontianak Barat	TRUE	Jasa
27	6171040020015	KOPERASI KONSUMEN CAHAYA MANDIRI SEJATI	105/BH/X/XVII.10	17/09/2010	Jalan Khatulistiwa KM. 4,3, Komplek PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	Batu Layang	Pontianak Utara	TRUE	Konsumen
28	6171040020035	Koperasi Pegawai Negeri Panca Setia Dharma SMAN 5	1521/BH/X	21/09/1994	Jl. Khatulistiwa	Batu Layang	Pontianak Utara	TRUE	Konsumen
29	6171040030005	KOPERASI KARYAWAN KAPUAS	317/BH/X TAHUN 1996	26/04/1996	Jl. Khatulistiwa KM. 2,7 Komp. PLTD Siantan	Siantan Hilir	Pontianak Utara	TRUE	Konsumen
30	6171040030034	Koperasi Pegawai Negeri STM 1 Pontianak	1340/BH/X	25/01/1991	Jl. Khatulistiwa No.215	Siantan Hilir	Pontianak Utara	TRUE	Konsumen
31	6171040040002	Koperasi Serba Usaha Cipta Agrotama	97/BH/XVII.10/2010	14/04/2010	Jl. Budi Utomo No 45	Siantan Hulu	Pontianak Utara	TRUE	Produsen
32	6171020080005	KOPERASI KARYAWAN POLTEKES BINA WIRA HUSADA KEMENKES PONTIANAK	155/BH/XVII.10 TAHUN 2016	16/04/2016	Jl. 28 Oktober RT.003/RW.26	Siantan Hulu	Pontianak Utara	TRUE	Konsumen
33	6171040040061	Koperasi Serba Usaha Hayati BPTP Pontianak	1087/BH/KWK.1 4/III/2000	14/03/2000	Jl. Budi Utomo No.57	Siantan Hulu	Pontianak Utara	TRUE	Konsumen
34	6171040050002	Koperasi Simpan Pinjam Syariaah Lingkar Asia	142/BH/XVII.10 TAHUN 2015	27/02/2015	Jl. Gusti Situt Mahmud Gg.Selat Karimata 1 No. 2	Siantan Tengah	Pontianak Utara	TRUE	Simpan Pinjam
35	6171040050091	KOPERASI SIMPAN PINJAM CU STELLA MARIS	148/BH/X	13/06/2005	Jl. Gst Situt Mahmud No.80 Pontianak	Siantan Tengah	Pontianak Utara	TRUE	Simpan Pinjam
36	6171050020003	Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Bina Kasih	21/BH/X	03/01/2002	Jl. Ir H Juanda No 200	Darat Sekip	Pontianak Kota	TRUE	Simpan Pinjam
37	6171050020035	Koperasi Karyawan Bhinneka Karya	686/BH/X	11/12/1973	Jl. Nusa Indah I Blok B No. 63 A, Kota Pontianak	Darat Sekip	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
38	6171050020056	KOPERASI PEGAWAI PT TELKOM	1136/BH/X	21/05/1985	Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Pontianak	Darat Sekip	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
39	6171050030001	KOPERASI SERBA USAHA BMT INSAN CITA	73/BH/X	07/06/2003	Jl. KH. Wahid hasyim No. 229 A	Mariana	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
40	6171050030005	Koperasi TKBM Jasa Karya	338/BH/X	29/08/1995	Jl. Pak Kasih No 6	Mariana	Pontianak Kota	TRUE	Jasa





NO	IDKOP	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	AKTIF	JENIS KOPERASI
41	6171050040001	KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA	1480/BH/X/93	27/09/1993	Jl. Uray Bawadi No. 72A	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Simpan Pinjam
42	6171050040004	KPN Ikhlas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat	750/BH/X	15/07/1975	Jalan Sutan Syahrir No 12 Pontianak	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
43	6171050040008	PRIMKOP KARTIKA CARYA DHARMA BABINMINVETCADDAM XII TPR	402/BH/AD/KW K.14/V/1996	29/05/1996	Jl. Gusti Hamzah No. 1	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
44	6171050040028	Koperasi Simpan Pinjam Borsag Mandiri Mangatasi	011024/BH/M.K UKM.2/XII/2018	07/12/2018	Jalan Ampera, Gang 8 Saudara Nomor : 15, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 029.	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
45	6171050040068	Koperasi Pegawai Negeri Warga Sejahtera SMK N 1	1048/BH/X	25/09/1982	Jl. Danau Sentarum	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
46	6171050040085	Koperasi Pegawai Negeri Sinar Mentari	822/BH/X/1997	28/04/1997	Jl. Pangeran Natakusuma Komp. SMPN 9 RT. 001 RW 002	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
47	6171050040182	Koperasi Serba Usaha Mitra Utama	126/BH/X	03/05/1999	Jl. Uray Bawadi No. 28	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
48	6171050040307	Koperasi Pegawai Negeri Bersinar KUKM PTK	38/BH/X	12/06/1996	Jl. Aliyanyang No. 7C, Sungai Bangkong	Sungai Bangkong	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
49	6171050060001	Koperasi Pegawai BNI Swadharma Pontianak	22/BH/XVII.10/TAHUN 2006	05/12/2006	Jl. Tanjungpura no.1 pontianak	Tengah	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
50	6171050060027	KOPERASI PERTANI KOPTANI	1157/BH/X	10/02/1986	Jl. Abdurahman Saleh, Komp. Citra Graha Indah No.10	Tengah	Pontianak Kota	TRUE	Jasa
51	6171050060074	Koperasi Pegawai Negeri Kopenda Kande Agama Kota Pontianak	410/BH/X/12-67	05/10/1968	Jl. Zainuddin No. 4	Tengah	Pontianak Kota	TRUE	Jasa
52	6171050060195	Koperasi Serba Usaha Anugerah Jaya SMPN 1 Pontianak	629/BH/X TAHUN 1996	10/10/1996	Jenderal Urip Sumoharjo	Tengah	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
53	6171050060302	KOPERASI JASA BINA SEJAHTERA	953/BH/X	16/01/1981	Jl. Zainuddin - Komplek Kantor Walikota	Tengah	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
54	6171050060320	Primer Koperasi Kartika Intan	16/BH/XVII.14/2011	10/03/2011	Jl. Jendral Sudirman No. 11	Tengah	Pontianak Kota	TRUE	Konsumen
55	6171060020131	Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Kalimantan Barat	193/BH/X	27/07/1962	Jl. A Yani	Bansir Darat	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
56	6171060020274	Koperasi Pegawai Negeri Syariah Al-Amanah Pengadilan Tinggi Agama	1517/BH/X	20/09/1994	Jl. A Yani No. 252 (Kantor Pengadilan Tinggi Agama)	Bansir Darat	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
57	6171060040004	KOPERASI PEGAWAI NEGERI NKKBS	1131/BH/X	25/04/1985	Jl. Adi Sucipto No. 70	Bangka Belitung Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
58	6171060040346	KOPERASI SERBA USAHA PATUH	114/BH/XVII.10/TAHUN 2011	26/01/2011	Jl. A. R. Saleh Gg. A. R. Saleh VIII No. 2 RT.003/RW.008 Kota Pontianak	Bangka Belitung Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Jasa
59	6171060030003	Primer Koperasi Pold Kalimantan Barat	1031/BH/X	01/07/1982	Jalan Ahmad Yani No 1 Pontianak	Bangka Belitung Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
60	6171060010006	KOPKAR SEJAHTERA PT DPN PTPN XIII	878/BH/X	22/07/1994	Jl. Adisucipto KM 10,6	Bangka Belitung Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
61	6171060010047	PRIMER KOPERASI KAPOTA YUDHA	83/BH/X/1995	10/10/1995	Jl. Imam Bonjol No. 2 (Komp. Kantor HUBDAM XVII / TPR)	Bansir Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
62	6171060050134	Koperasi Pegawai Negeri Untan	254/BH/X	20/03/1996	Jl. Daya Nasional	Bansir Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
63	6171060050270	Koperasi Karyawan Dokar FKIP Untan	68/BH/X	12/11/2002	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi FKIP Untan	Bansir Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen
64	6171060050305	KOPERASI KONSUMEN AMANAH MAKMUR SEJAHTERA	145/BH/X	19/05/2005	Jl. Adi Sucipto Gang 777 (SDN 37)	Bansir Laut	Pontianak Tenggara	TRUE	Konsumen

Untuk merealisasikan capaian indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan 1 (satu) program :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM, dengan indikator kinerja program adalah : persentase koperasi aktif

Kinerja Koperasi aktif di Kota Pontianak pada Tahun 2020 dengan capaian 94,79%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah koperasi aktif sebanyak 492 Koperasi dengan Jumlah seluruh koperasi Kota Pontianak sebanyak 519 Koperasi. Koperasi yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang masih menjalankan aktivitas usahanya (ada transaksi koperasi) dan aktivitas organisasinya (pengurus, pengawas dan Anggota) memenuhi persyaratan dalam UU





No.25 Tahun 1992, dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Prosentase koperasi aktif Tahun 2020 dihitung dengan membandingkan jumlah koperasi aktif tahun 2020 sebanyak 492 koperasi dengan jumlah koperasi secara keseluruhan sebanyak 519 koperasi. Sebelumnya Jumlah koperasi secara keseluruhan sebanyak 815 unit dan dikurangi jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 296 koperasi yang tidak bisa dibina kembali, masuk dalam program koperasi yang akan dibubarkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 65/kep/M.KUKM.2/VII/2017, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :14/KEP/M.KUKM.2/XII/2016, Tentang Pembubaran Koperasi sebanyak 296 koperasi sehingga prosentase koperasi aktif Tahun 2020 menjadi sebesar 94,79 % dibandingkan dengan target 95.40% atau capaian target sebesar 99.36% dan masuk pada kategori **Sangat Berhasil**.

4) Persentase usaha mikro menjadi wirausaha

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Perkembangan usaha mikro menjadi wirausaha dan memiliki legalitas usaha sampai dengan Tahun 2020 bertambah sebanyak 1129 Unit menjadi 6855 Unit. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kota Pontianak, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil antara lain perlu dilakukan dengan pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui pemrosesan secara online / Online Sistem Submidsion (OSS) yang bisa langsung diakses oleh pelaku usaha maupun calon pelaku usaha penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak. Kinerja





Jumlah usaha mikro menjadi wirausaha Tahun 2020 dari target 100 tercapai 100% dan masuk kategori **Sangat Berhasil**. Untuk merealisasikan capaian indikator ini ditempuh melalui pelaksanaan sasaran meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro dengan indikator Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru melalui 3 (tiga) program :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3. Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM).

Pencapaian sasaran meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro dengan indikator persentase pertumbuhan usaha mikro baru Tahun 2020 dari target 4,22% terealisasi 1352 usaha mikro atau 23,61 persen dan masuk kategori **Sangat Berhasil**.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2017, Tahun 2018 dan di Tahun 2019. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut :

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2020 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya



No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	14.61%	18.12%	17.87%	17.88%	17.88%	122%
1.	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5.88%	---	5.88%	5.88%	5.88%	100%
2	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina)	4%	-	-	-	4%	100%
4.	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	95%	100%	100%	100%	100%	105%
II	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	16.17%	16.62%	16.69%	17.41%	17.41%	107%
5	persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	25%	-	-	-	25%	100%
6	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90%	100%	100%	100%	100%	105%
7	Persentase pertumbuhan industri	2.09	1.89%	2.21%	1.61%	35.87	171%
III.a	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	4.0%	-	-	19.34%	12.33%	308%
III.b	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	persentase koperasi aktif	95.40%	95,94%	95,90%	95,40%	94,36%	99.79%
9.	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.22%	8.75%	0.63%	2.47%	23.61%	100%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada masing-masing Indikator sebagai berikut :

I. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target Indikator tujuan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih berfluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2017 realisasi sebesar 18.12%, Tahun 2018 menurun menjadi 17.87%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17.88%. dan untuk tahun 2020 data kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB masih belum diperoleh,





namun secara umum Kondisi perekonomian nasional mengalami penurunan bahkan minus di masa pandemi covid 19. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Pontianak masih memberikan sumbangsih paling tinggi dibanding dengan sektor – sektor lain. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 untuk indikator sasaran dari indikator tujuan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar Realisasi Indikatornya di Tahun 2020 tidak mengalami peningkatan . Persentase Pasar Rakyat binaan yang memenuhi SNI Pasar tahun 2018 sebesar 5.88% (perbandingan dari pasar yang memenuhi SNI Pasar yaitu pasar flamboyan berbanding dengan jumlah pasar rakyat binaan sebanyak 17 pasar). Dibandingkan target 5,88% pencapaian Indikator Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

2. Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan.

Dari tabel III.3, terlihat bahwa target Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan tiap tahunnya masih sama yaitu 100%, yang artinya Stok SEMBAKO setiap tahunnya mencukupi. Untuk tahun 2020 di masa pandemi covid 19 ini stok SEMBAKO tetap terjaga. Hal ini karena berbagai upaya melakukan sosialisasi untuk mengurangi panic buying. Dibandingkan target 100% pencapaian Indikator Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

3. Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina.

Dari tabel III.3, terlihat bahwa target Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina tidak mengalami peningkatan. Pembinaan pelaku ekspor dan impor hanya sebatas pada penyampaian laporan realisasi impor saja. Dibandingkan target 4% pencapaian Indikator Persentase



pelaku ekspor dan impor yang dibina pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

4. Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti.

Dari tabel III.3, terlihat bahwa target Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti setiap tahun telah maksimal pencapaiannya. Tindak lanjut pengawasan Barang beredar di kota Pontianak yang tidak sesuai dengan ketentuan berupa memberikan surat peringatan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Pemerintah yang berlaku. Dibandingkan target 95% pencapaian Indikator Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

ii. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB

Dari tabel III.3, terlihat bahwa target indikator tujuan Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun 2019 adalah sebesar 17.41%. Pada kategori industri pengolahan penyumbang terbesar di tahun 2019 adalah industri makanan dan minuman mencapai 3,97 triliun rupiah atau sebesar 65,70 persen. Berikutnya industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 13,05 persen; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 8,24 persen; dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 5,92 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari lima persen. Data Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2020 masih belum diperoleh, namun secara umum kondisi perekonomian di masa pandemi covid 19 mengalami penurunan bahkan minus hal ini juga berdampak pada Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Pontianak. Kontribusi sektor Industri terhadap terhadap PDRB di Kota Pontianak masih memberikan sumbangsih di posisi kedua dibanding dengan sektor – sektor lain.





Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 untuk indikator sasaran dari indikator tujuan Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebagai berikut :

1. persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri untuk tahun 2020 masih stagnan. Jumlah sarana prasarana klaster industri yang masih bertahan di Tahun 2020 di Kota Pontianak adalah kampung tenun, batik kamboja dan klaster akar keladi air, kampung caping mendawai. Sarana prasarana klaster industri yang ditingkatkan berdasarkan permintaan kebutuhan di setiap kelurahan seKota Pontianak. Perbandingan capaian indikator ini dengan tahun sebelumnya belum dilakukan karena indikator ini merupakan indikator baru untuk tahun 2020. Dibandingkan target 25% pencapaian Indikator persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

2. Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan setiap tahunnya telah maksimal pencapaiannya. Monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan perizinan industri adalah pada kesesuaian perizinan dengan kondisi lapangan industri, kesesuaian mesin, dan kesesuaian tenaga kerja. Dibandingkan target 90% pencapaian Indikator Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

3. Persentase pertumbuhan industri

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase pertumbuhan industri setiap tahunnya cukup berfluktuatif. Tahun 2017 pencapaian indikator sebesar 1.89% dibandingkan target pencapaian 100%, Tahun 2018 menjadi sebesar 2,21% dibandingkan target pencapaian 100%. Tahun 2019 pencapaian indikator Persentase pertumbuhan industri sebesar 100% atau 1,61 %.



Untuk Tahun 2020 pencapaian indikator Persentase pertumbuhan industri sebesar 171% atau 35,87 %. Pencapaian persentase pertumbuhan industri untuk tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan karena perijinan industri per tahun tetap dihitung sebagai industri baru tahun yang bersangkutan, dan di masa pandemi covid 19 banyak perusahaan besar yang menghentikan usaha atau memberhentikan karyawannya sehingga memaksa masyarakat menjadi pelaku usaha khususnya di bidang industri. Dibandingkan target 2.09% pencapaian Indikator Persentase pertumbuhan industri pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

III. PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS

Dari tabel III.3, terlihat bahwa target indikator tujuan persentase koperasi berkualitas mengalami penurunan. Persentase koperasi yang berkualitas diperoleh dari perbandingan jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan berdasarkan asset, omzet berbanding dengan jumlah koperasi seluruhnya. Tahun 2019 adalah sebesar 19.34% dengan tingkat koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 116 koperasi sedangkan pada tahun 2020 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT berjumlah 64 koperasi atau 12.33%. Persentase koperasi berkualitas menurun karena tahun 2020 dimasa pandemic covid-19 ada pembatasan social sehingga tidak memungkinkan pengurus koperasi untuk menyelenggarakan RAT dan belum tersosialisasinya kewajiban koperasi untuk menyampaikan laporan kepada dinas Pembina. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 untuk indikator sasaran dari indikator tujuan Persentase koperasi yang berkualitas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi aktif

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase Koperasi aktif di Tahun 2017 sebesar 95,94%, Tahun 2018 pencapaian indikator sebesar 95,90%, Tahun 2019 pencapaian indikator sebesar 95,40% dan Pada Tahun 2020 pencapaian indikator persentase koperasi aktif sebesar 99,79% atau





94,36% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 95.40%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Koperasi aktif masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.

IV. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Dari tabel III.3, terlihat bahwa target indikator tujuan pencapaian persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha sudah maksimal setiap tahunnya atau pencapaian 100%. Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha diperoleh dengan asumsi bahwa usaha mikro yang telah terdaftar atau memperoleh izin usaha mikro sudah menjadi wirausaha. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 untuk indikator sasaran dari indikator tujuan persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru

Dari tabel III.3, terlihat bahwa Target pada Indikator Kinerja Utama pada sasaran Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru, Realisasi Indikatornya di Tahun 2020 mengalami pertumbuhan yang sangat besar, hal ini karena ada program pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional dengan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro untuk tetap produktif walaupun dimasa pandemi covid 19. Pencapaian persentase Pertumbuhan usaha mikro baru setiap tahunnya cukup berfluktuatif. Tahun 2017 pencapaian indikator persentase Pertumbuhan usaha mikro baru sebesar 8.75% atau sebanyak 447 usaha, Tahun 2018 pencapaian indikator sebesar 0.63% atau sebanyak 35 usaha, Tahun 2019 pencapaian indikator sebesar 2.47% atau sebanyak 138 usaha, dan Tahun 2020 pencapaian indikator persentase Pertumbuhan usaha mikro baru sebesar 23.61% atau sebanyak 1352 Usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator persentase Pertumbuhan usaha mikro baru masuk pada kategori **“Sangat Berhasil”**.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan Target Capaian Tahun 2020 sudah mencapai Target yang ditetapkan. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target dapat dilihat pada Tabel III.4 :

Tabel. III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target Tahun 2020 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	14.61%	17.88%	14.61%
1.	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5.88%	5.88%	5.88%
2	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	100%
3.	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina)	4%	4%	-
4.	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	95%	100%	100%
II	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	16.17%	17.41%	16,17%
5	persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	25%	25%	25%
6	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90%	100%	90%
7	Persentase pertumbuhan industri	2.09%	35.87%	2.18%
III.a	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	4.0%	12.33%	4.00%
III.b	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA	100%	100%	100%
8	persentase koperasi aktif	95.40%	94,36%	95.40%
9.	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.22%	23.61%	4.22%

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja masing – masing Indikator :

I. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 14,61%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 14.61%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 17,88% atau 122% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.





Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

1. Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 5,88%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 5.88%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 5.88% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

2. Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan.

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 100%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 100% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

3. Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina.

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar -, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 4%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 4% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

4. Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti.

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 100%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 95%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 95% atau 105% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

II. KONTRIBUSI SEKTOR PERINDUSTRIAN TERHADAP PDRB

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 16,17%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 16.17%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 17,41% atau 107% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.





Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

1. persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 25%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 25%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 25% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

2. Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 90%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 90%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 100% atau 111% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

3. Persentase pertumbuhan industri

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 2.18%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 2.09%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 35.87% atau 171% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

III. PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 4%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 4%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 12.33% atau 308% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

1. Persentase Koperasi aktif

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 95.40%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 95.40%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 94.36% atau 99% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.





IV. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 100%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 100% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

1. Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 4.22%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 4.22%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 23.61% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian indikator kinerja Pemerintah Kota Pontianak khususnya Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dibandingkan dengan standar nasional belum ada, ini dapat dilihat pada Tabel III.5.

Tabel. III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	14.61%	17.88%	-
1.	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5.88%	5.88%	-
2	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	-
3.	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	4%	4%	-
4.	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	95%	100%	-
II	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	16.17%	17.41%	-
5	persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	25%	25%	-
6	Persentase Industri yang memenuhi	90%	100%	-



	kelayakan perizinan			
7	Persentase pertumbuhan industri	2.09	35.87	-
III.a	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	4.0%	12.33%	-
III.b	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA	100%	100%	-
8	persentase koperasi aktif	95.40%	94,36%	-
9.	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4.22%	23.61%	-

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, 2020

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pada Tabel III.6 menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel. III.6
Analisis Penyebab Peningkatan/ Penurunan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	Peningkatan	1. letak dan fungsi kota pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan dan jasa. 2. Pelayanan Perizinan Berusaha yang kondusif. 3. Pengendalian Tingkat inflasi yang memadai. 4. daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat mengutamakan kepada kebutuhan bahan pokok (pangan). 5. Tersedianya pusat - pusat perbelanjaan modern, tempat hiburan, restoran/rumah makan serta didukung oleh fasilitas hotel/penginapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomis pengunjung. 6. menjadi destinasi belanja bagi wisatawan domestik yang berasal dari kabupaten/kota di Kalimantan Barat diluar Kota Pontianak	1. Terus mempedomani RPJP Kota Pontianak. 2. Tetap mempertahankan pelayanan perizinan yang kondusif. 3. Mengoptimalkan peran OPD dan masyarakat dalam pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok melalui aplikasi. 4. Terus meningkatkan sarana prasarana perdagangan yang terkait dengan kelancaran pendistribusian Bapokting. 5. Terus mengoptimalkan pengendalian inflasi daerah. 6. Terus mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kelancaran distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya.
1	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	Peningkatan	1. Adanya Asosiasi Pasar dan BKPM (Badan Koordinasi Polisi dengan Masyarakat). 2. Adanya GAPIKAN (Gabungan Pengusaha Ikan Pasar	1. Mengoptimalkan BKPM, Asosiasi dan pelaku usaha/pedagang untuk menjaga keamanan pasar 2. Mengoptimalkan peran GAPIKAN dalam mempertahankan pasar





			Flamboyan),		rakyat berSNI.
			3. Adanya bantuan sarana prasarana ruang laktasi dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan.	3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SNI pasar.	
			4. Arah kebijakan pembangunan pasar ditujukan untuk memenuhi standar pasar yang berSNI.	4. Melaksanakan manajemen pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk memenuhi standar SNI Pasar (SNI) 8152:201X.	
			5. Pengelolaan Pasar yang diarahkan untuk memenuhi standar SNI Pasar (SNI) 8152:201X.	5. Terus melakukan revitalisasi pasar sesuai dengan SNI.	
2	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Peningkatan	1. Pengendalian Jalur distribusi SEMBAKO yang memadai.	1. Terus mengoptimalkan monitoring dan evaluasi terhadap ketersediaan SEMBAKO di Gudang.	
			2. Aksesibilitas pergudangan yang lancar.	2. melakukan penguatan infrastruktur logistik pangan serta melakukan penguatan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, utamanya pada komoditas daging ayam dan ikan tangkap.	
			3. Pengendalian pemberitaan yang tidak berimbang terhadap informasi harga maupun ketersediaan stok bahan pokok yang akan memicu masyarakat untuk melakukan Panic buying (belanja secara berlebih-lebihan) selama pandemi covid 19.	3. mendorong masyarakat untuk swasembada komoditi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri.	
3	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina)	Peningkatan	1. Tingkat Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang memadai dalam pembinaan pelaku usaha ekspor dan impor	1. Terus melakukan penguatan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota	
			2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan ekspor dan impor secara berkala.	2. Terus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha ekspor dan impor.	
				3. Mengoptimalkan perizinan berusaha di bidang usaha ekspor dan impor.	
4	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	Peningkatan	1. Pengawasan barang beredar yang intensif	1. Terus meningkatkan monitoring dan evaluasi barang beredar	
			2. Meningkatnya pembinaan kepada pelaku usaha	2. Terus meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha	
			3. Koordinasi antar instansi lintas sektoral	3. Terus meningkatkan koordinasi	
II	KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	Peningkatan	1. letak dan fungsi kota pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan dan jasa.	1. pembinaan terhadap 14 item turunan industri kreatif	
			2. meningkatunya industri kreatif.	2. pembinaan dan pengembangan industri Aloe vera	
			3. Tata letak geografis menjadi nilai tambah	3. fasilitasi pembinaan dan pengawasan industri kecil menengah	
			4. Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah		
1	persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri	Peningkatan	1. meningkatnya klaster industri	1. pembinaan dan menumbuhkan klaster baru dan pengawasan terhadap klaster baru yang ada	
			2. meningkatnya SDM pelaku industri	2. pelatihan SDM baik Kriya dan Aneka Kuliner	
			3. meningkatnya mutu pelaku industri	3. Pembinaan melalui gugus kendali mutu (GKM)	
			4. pengembangan teknologi pelaku industri	4. Fasilitasi bantuan mesin peralatan industri	





				5. Fasilitas berkenaan HaKI, Paten Sertifikasi Halal, SNI Produk dan Pelatihan Keamanan Pangan .
2	Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan	Peningkatan	1. Sinkronisasi validasi dan kemudahan perizinan industri 2. Meningkatnya perizinan industri kecil menengah	1. Pemeriksaan kelayakan perizinan bagi para pelaku industri. 2. Monitoring terhadap perizinan industri baik dari bahan baku sampai dengan produk akhir. 3. Penginformasian berkenaan data industry 4. Kerja sama dengan stakeholder berkenaan kemudahan akses perbankan
3	Persentase pertumbuhan industri	Peningkatan	1. adanya dukungan Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan ruang gerak yang besar untuk pelaku industri ; 2. adanya asosiasi para pelaku industri kreatif dari berbagai sektor industri kreatif, 3. bahan baku yang cukup tersedia seperti : aloe vera, keladi air, pemanfaatan limbah menjadi industri kriya dan; 4. daya kreatifitas yang tak terbatas khususnya untuk sektor industri kuliner. 5. Adanya Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak 6. Adanya promosi untuk meningkatkan kualitas produk pelaku industri.	1. Terus meningkatkan sarana/prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri . 2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kreatif. 3. Memotivasi pelaku industri kreatif dalam pemanfaatan bahan baku yang cukup. 4. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kuliner. 5. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak. 6. Promosi tingkat lokal, nasional maupun internasional.
III	PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS	Peningkatan	1. Meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT. 2. Meningkatnya usaha koperasi. 3. Meningkatnya jumlah anggota koperasi. 4. Meningkatnya omset koperasi. 5. Meningkatnya kuantitas koperasi 6. Meningkatnya permodalan koperasi. 7. Meningkatnya koperasi naik kelas.	1. Terus meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi. 2. Terus meningkatkan kompetensi SDM koperasi. 3. Terus meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan. 4. Terus meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi. 5. Terus meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga. 6. Terus meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.



1	persentase koperasi aktif	Peningkatan	1. Adanya program koperasi yang akan dibubarkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 65/kep/M.KUKM.2/VII/2017, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016, Tentang Pembubaran Koperasi.	1. Terus menginventarisir Koperasi yang tidak aktif untuk dimasukkan dalam program pembubaran koperasi oleh Pemerintah. 2. Terus Memotivasi Koperasi menjadi berkualitas. 3. Terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang kurang aktif.
IV PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRUSAHA				
1	Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	Peningkatan	1. Meningkatnya legalitas jumlah pelaku usaha. 2. Meningkatnya masyarakat yang menjadi pelaku usaha mikro. 3. Meningkatnya masyarakat yang mengakses pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan. 4. Meningkatnya Kerjasama pelaku usaha melalui e-commerce.	1. Terus memfasilitasi kemudahan dalam pengurusan izin pelaku usaha. 2. Terus memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan. 3. Terus memberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan.
			1. pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana atau terintegrasi melalui online single submission (OSS). 2. Adanya program pemerintah pusat BPUM untuk pengembangan Usaha mikro.	1. Terus memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha. 2. Terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha. 3. Terus meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.

Dari Tabel III.6, dapat disampaikan Analisis keberhasilan dan Solusi mempertahankan kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

I. KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 adalah sebesar 17.88%. Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang lebih dari 16 persen. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 6.52 triliun rupiah atau sekitar 16,78 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 58.48 persen merupakan sumbangan dari subkategori perdagangan besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 41,51 persen merupakan sumbangan dari subkategori perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Secara



umum, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor cenderung menurun selama periode 2015-2019. Laju pertumbuhan sebesar 5,79 persen di tahun 2017 menurun menjadi 4,47 di tahun 2019. Salah satu penyebabnya adalah masih belum membaiknya perekonomian di kabupaten sekitar Kota Pontianak yang berpengaruh pada kategori ini.

1. Jumlah Pasar Rakyat yang memenuhi SNI Pasar

Realisasi Indikator Kinerja pada Jumlah Pasar Rakyat yang memenuhi SNI Pasar di Tahun 2020 sebanyak 1 (satu) pasar (Pasar Flamboyan) tidak mengalami Peningkatan jika di bandingkan dengan Realisasi di Tahun 2019. Hal ini di sebabkan karena sarana prasarana dan manajemen pengelolaan pasar masih perlu ditambah untuk memenuhi standar SNI Pasar (SNI) 8152:201X.

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian target Pasar Rakyat Rakyat yang memenuhi SNI Pasar adalah :

1. Tingkat kesadaran pelaku usaha/pedagang di pasar untuk menjaga kebersihan masih rendah,
2. Kesadaran membayar biaya pemanfaatan, masih rendah dan tidak tepat waktu
3. Tingkat keamanan masih rendah.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk pencapaian target Pasar Rakyat Rakyat yang memenuhi SNI Pasar adalah :

1. Mengoptimalkan BKPM, Asosiasi dan pelaku usaha/pedagang untuk menjaga keamanan pasar
2. Mengoptimalkan peran GAPIKAN dalam mempertahankan pasar rakyat berSNI.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan SNI pasar.
4. Melaksanakan manajemen pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk memenuhi standar SNI Pasar (SNI) 8152:201X.
5. Terus melakukan revitalisasi pasar sesuai dengan SNI.





2. Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan.

Realisasi Indikator Kinerja pada Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan di Tahun 2020 sebesar 100% masih tetap jika dibandingkan dengan Realisasi di Tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena letak dan fungsi kota Pontianak diarahkan menjadi kota perdagangan dan jasa, daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, tersedianya pusat-pusat perbelanjaan modern, tempat hiburan, restoran/rumah makan serta didukung oleh fasilitas hotel/penginapan yang sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomis pengunjung, aksesibilitas pergudangan yang lancar dan menjadi destinasi belanja bagi wisatawan domestik yang berasal dari kabupaten/kota di Kalimantan Barat diluar Kota Pontianak. Pencapaian tahun 2020 mencapai 100 persen dan masuk dalam kategori sangat berhasil karena Stok SEMBAKO mencukupi sepanjang tahun 2020. Upaya kedepan untuk menjaga ketersediaan stok SEMBAKO di Kota Pontianak adalah melakukan penguatan infrastruktur logistik pangan serta melakukan penguatan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, utamanya pada komoditas daging ayam dan ikan tangkap; mendorong masyarakat untuk swasembada komoditi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok melalui aplikasi.

3. Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina

Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Tingkat Koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota yang memadai dalam pembinaan pelaku usaha ekspor dan impor
2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan ekspor dan impor secara berkala.





4. Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti

Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti mengalami peningkatan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Pengawasan barang beredar yang instensif
2. Meningkatnya pembinaan kepada pelaku usaha
3. Koordinasi antar instansi lintas sektoral

II. KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB

Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2019 adalah sebesar 17.41%. Pada kategori industri pengolahan penyumbang terbesar di tahun 2019 adalah industri makanan dan minuman mencapai 3,97 triliun rupiah atau sebesar 65,70 persen. Berikutnya industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 13,05 persen; industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 8,24 persen; dan industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 5,92 persen. Selain itu, peranan kategori lainnya kurang dari lima persen.

1. Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster Industri

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 25%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 25%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 25% atau 100% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

2. Persentase Industri yang memenuhi kelayakan perizinan

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 90%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 90%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 100% atau 111% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

3. Persentase pertumbuhan industri

Pada Indikator ini, Target di Tahun 2021 sebesar 2.18%, Target Tahun 2020 yaitu sebesar 2.09%. Realisasi Indikator Kinerja di Tahun 2020 sebesar 35.87% atau 171% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dapat tercapai.

Untuk mempertahankan kinerja persentase pertumbuhan industri kreatif upaya yang akan dilakukan :

1. Terus meningkatkan sarana / prasarana dan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi pelaku industri .
2. Menjalin kerjasama dengan asosiasi yang ada untuk pengembangan industri kreatif.
3. Memotivasi pelaku industri kreatif dalam pemanfaatan bahan baku yang cukup.
4. Terus meningkatkan daya kreatifitas terutama pada sektor industri kuliner.
5. Mendorong pertumbuhan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak.
6. Promosi tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Upaya kedepan untuk pencapaian indikator pertumbuhan industri kreatif adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan Pemerintah Kota Pontianak yang memberikan ruang gerak yang besar untuk pelaku industri ;
2. Adanya asosiasi para pelaku industri kreatif dari berbagai sektor industri kreatif,
3. Bahan baku yang cukup tersedia seperti : aloe vera, keladi air, pemanfaatan limbah menjadi industri kriya dan;
4. Daya kreatifitas yang tak terbatas khususnya untuk sektor industri kuliner.
5. Adanya Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak





6. Adanya promosi untuk meningkatkan kualitas produk pelaku industri.

III. PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS

Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian social. Tahun 2020 Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, Volume usaha dan Aset sebanyak 64 unit koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 519 unit atau sebesar 12,33 Persen.

1. Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif di Tahun 2020 yaitu sebesar 95,40%, tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan tahun sebelumnya yaitu 95,94%. Penurunan persentase jumlah koperasi ini juga disebabkan oleh beberapa koperasi yang naik kelas menjadi binaan Provinsi. Selain itu, jumlah persentase yang cukup tinggi ini juga disebabkan karena telah dilaksanakannya program koperasi yang akan dibubarkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor :65/kep/M.KUKM.2/VII/2017, Tentang Perubahan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :114/KEP/M.KUKM.2/XII/2016, Tentang Pembubaran Koperasi. Jumlah koperasi aktif tahun 2020 sebanyak 492 unit dan koperasi Tidak Aktif sebanyak 27 unit sedangkan Koperasi yang dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebanyak 296 unit. Upaya yang akan dilakukan untuk mempertahankan persentase Koperasi Aktif adalah terus menginventarisir Koperasi yang Tidak Aktif untuk dimasukkan dalam Program pembubaran koperasi oleh pemerintah dan menjaga Koperasi Aktif agar tidak turun menjadi Koperasi Tidak Aktif melalui monitoring dan motivasi RAT.

Adapun faktor yang menghambat koperasi aktif adalah :





1. Sumber daya manusia Koperasi masih belum memadai.
2. Kurangnya pemahaman gerakan Koperasi dalam penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi dan partisipasi, pengawasan anggota dan pengelolaan koperasi untuk pengembangan koperasi.
3. belum adanya pengembangan sistem yang memudahkan perangkat koperasi melaporkan aktivitas kelembagaannya.
4. Belum optimal Koperasi dapat meningkatkan produk unggulan daerah menjadi komoditas ekspor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

1. Terus meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga koperasi.
2. Terus meningkatkan kompetensi SDM koperasi.
3. Terus meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap perundang-undangan.
4. Terus meningkatkan partisipasi anggota terhadap usaha koperasi.
5. Terus meningkatkan Kerjasama pembiayaan dengan pihak ketiga.
6. Terus meningkatkan unit usaha yang dikelola koperasi.

IV. PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRAUSAHA

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Perkembangan usaha mikro menjadi wirausaha dan memiliki legalitas usaha sampai dengan Tahun 2020 bertambah sebanyak 1129 Unit menjadi 6855 Unit. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kota Pontianak, perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil antara lain perlu dilakukan dengan pemberian izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui pemrosesan secara online / Online Sistem Submision (OSS) yang bisa langsung diakses oleh pelaku usaha





maupun calon pelaku usaha penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

1. Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah :

1. Terus memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk melengkapi perizinan yang diperlukan untuk berusaha.
2. Terus melaksanakan pelatihan kewirausahaan kepada pelaku wirausaha.
3. Terus meningkatkan Kerjasama pemasaran baik secara online maupun offline.

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak pada tahun 2020 dialokasikan dari sisi dana dan penyerapannya sebesar Rp. 18.175.314.922,- Realisasinya sebesar Rp. 16.682.313.556 (92 %) dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi sebesar Rp. 16.788.309.822,- realisasi sebesar Rp. 15.299.703.756 (91%) sisanya sebesar Rp 1.488.606.066,- (9%) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai pagu sebesar Rp. 1.350.250.000,- Realisasi sebesar Rp. 1.316.485.000,- (97%) sisanya sebesar Rp 33.765.000 (3%)
 - b. Belanja Barang dan Jasa, pagu sebesar Rp. 6.150.728.782,- Realisasinya sebesar Rp. 5.935.339.579,- (96 %). Sisanya sebesar Rp. 215.389.203,- (4 %).
- Belanja Modal , pagu sebesar Rp. 1.387.005.100,- Realisasinya sebesar Rp. 1.382.609.800,-(100%) sisanya sebesar Rp. 4.395.300,- (%).



Adapun rincian realisasi Anggaran Tahun 2020 sebagai berikut :

Kode	Uraian	PAGU	REALISASI	%
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN	3.053.820.000	3.305.727.600	108
	Retribusi pelayanan pasar	1.980.000.000	1.614.639.000	82
	retribusi pelayanan tera/tera ulang	100.000.000	246.333.100	246
	hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa	973.820.000	1.444.755.500	148
	BELANJA	Rp 18.175.314.922	Rp 16.685.313.556	92
2.11.2.11.01.00.01.001	Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 9.969.151.040	Rp 8.696.159.177	87
2.11.2.11.01.01.	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp 1.280.839.687	Rp 1.260.259.385	98
2.11.2.11.01.00.01.005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 332.002.000	Rp 313.422.950	94
2.11.2.11.01.00.01.008	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 21.834.087	Rp 21.797.000	100
2.11.2.11.01.00.01.009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100
2.11.2.11.01.00.01.010	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100
2.11.2.11.01.00.01.011	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 11.760.000	Rp 11.500.000	98
2.11.2.11.01.00.01.012	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 4.900.000	Rp 4.891.500	100
2.11.2.11.01.00.01.013	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp 20.604.000	Rp 20.604.000	100
2.11.2.11.01.00.01.014	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Rp 2.740.000	Rp 2.482.500	91
2.11.2.11.01.00.01.025	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Rp 409.769.600	Rp 408.556.435	100
2.11.2.11.01.00.01.417	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan	Rp 459.230.000	Rp 459.005.000	100
2.11.2.11.01.00.01.445	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	Rp -	Rp -	-



Kode	Uraian	PAGU	REALISASI	%
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5
2.11.2.11.01.00.02.001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 24.140.000	Rp 24.140.000	100
2.11.2.11.01.00.02.012	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Rp 14.040.000	Rp 9.039.001	64
2.11.2.11.01.00.02.188	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor	Rp 37.780.000	Rp 30.123.000	80
2.11.2.11.01.00.02.238	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 211.793.100	Rp 207.677.800	98
2.11.2.11.01.00.02.239	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 7.050.000	Rp 5.842.500	83
2.11.2.11.01.00.05.003	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rp 5.523.400	Rp 5.253.400	95
2.11.2.11.01.00.06.001	Penyusunan Rencana Kerja	Rp 425.000	Rp 425.000	100
2.11.2.11.01.00.06.004	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Rp 325.000	Rp 325.000	100
2.11.2.11.01.00.07.006	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.08.001	Penyusunan Laporan Keuangan	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.09.005	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.10.001	Penyusunan Data dan Profil OPD	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.11.002	Pengelolaan Website SKPD	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.16.-	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.16.001	Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Rp 60.130.000	Rp 60.030.000	100
2.11.2.11.01.00.17.002	Pengembangan Pemasaran Berbasis IT	Rp 60.130.000	Rp 60.030.000	100
2.11.2.11.01.00.17.003	Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (KUMKM)	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.18.006	Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.19.001	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.18.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM	Rp 448.033.020	Rp 423.522.723	95
2.11.2.11.01.00.19.002	Motivasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Rp 26.530.300	Rp 26.530.000	100
2.11.2.11.01.00.19.003	Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian	Rp -	Rp -	-
2.11.2.11.01.00.19.005	Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	Rp 421.502.720	Rp 396.992.723	94
2.11.2.11.01.28.	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Rp 52.526.425	Rp 52.490.000	100
2.11.2.11.01.00.20.001	Penataan dan Pengendalian PKL	Rp 52.526.425	Rp 52.490.000	100
3.06.2.11.01.21	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 1.331.500	Rp 1.331.500	100
3.06.2.11.01.00.21.001	Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API)	Rp 1.331.500	Rp 1.331.500	100



Kode	Uraian	PAGU	REALISASI	%
		Jumlah (Rp.)	Jumlah (Rp.)	
1	2	3	4	5
3.06.2.11.01.00.22.	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional	Rp 3.710.458.100	Rp 3.563.920.192	96
3.06.2.11.01.00.22.003	Pengamanan dan Kebersihan Pasar	Rp 1.552.041.525	Rp 1.549.370.292	100
3.06.2.11.01.00.22.005	Registrasi dan Pendataan Objek retribusi	Rp 43.169.425	Rp 43.162.100	100
3.06.2.11.01.00.22.007	Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar	Rp 5.741.425	Rp 5.739.400	100
3.06.2.11.01.00.22.008	Operasional UPTD Pasar Rakyat	Rp 3.741.925	Rp 3.739.000	100
3.06.2.11.01.00.22.009	Pembersihan Saluran Pasar Rakyat	Rp 64.732.900	Rp 64.731.600	100
3.06.2.11.01.00.22.011	Renovasi Pasar	Rp 726.369.000	Rp 725.086.800	100
3.06.2.11.01.00.22.013	Pemeliharaan dan Pembinaan Pasar Rakyat	Rp 1.314.661.900	Rp 1.172.091.000	89
3.06.2.11.01.23	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Rp 38.808.900	Rp 38.803.500	100
3.06.2.11.01.00.23.001	Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya	Rp 2.349.400	Rp 2.349.400	100
3.06.2.11.01.00.23.002	Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah	Rp 36.459.500	Rp 36.454.100	100
3.06.2.11.01.00.23.003	Gelar Dagang Pelaku Usaha	Rp -	Rp -	
3.06.2.11.01.24	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Rp 2.268.275.750	Rp 2.261.287.378	100
3.06.2.11.01.00.24.001	Fasilitasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya	Rp 1.910.084.000	Rp 1.910.000.000	100
3.06.2.11.01.00.24.002	Operasional UPT Kemetrollogian Daerah	Rp 356.415.750	Rp 349.511.378	98
3.06.2.11.01.00.24.003	Pengawasan Barang Beredar	Rp 1.776.000	Rp 1.776.000	100
3.06.2.11.01.00.24.008	Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan Standar Kemetrollogian Daerah	Rp -	Rp -	
3.07.2.11.01.15.	PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF	Rp 44.184.000	Rp 44.184.000	100
3.07.2.11.01.00.25.001	Pengujian dan Monev Produk Pangan	Rp 44.184.000	Rp 44.184.000	100
3.07.2.11.01.00.25.004	Promosi dan Pameran Produk Industri kreatif	Rp -	Rp -	
3.07.2.11.01.00.25.005	Pembinaan dan Pelatihan Industri	Rp -	Rp -	
3.07.2.11.01.26.	PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA ARGO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)	Rp -	Rp -	-
3.07.2.11.01.00.26.002	Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri	Rp -	Rp -	
3.07.2.11.01.27.	PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA DAN ANEKA	Rp 500.000	Rp 500.000	100
3.07.2.11.01.00.27.001	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 500.000	Rp 500.000	100
TOTAL BELANJA LANGSUNG		Rp 18.175.314.922	Rp 16.685.313.556	91,80





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).
2. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak telah melaksanakan 9 (sembilan) sasaran dengan predikat "**Sangat Berhasil**".
3. Persentase pencapaian sasaran atau kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak secara umum dengan nilai rata – rata adalah **92,5** dan masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.
4. Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan adalah :
 - a. Anggaran Pendapatan dengan target sebesar **Rp. 3.053.820.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 3.305.727.600,-** atau sebesar **108%**.
 - b. Anggaran Belanja dengan target sebesar **Rp. 16.788.309.822,-** dengan realisasi **Rp. 15.299.703.756,-** atau sebesar **92%**.

B. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:





1. Melengkapi sarana prasarana, kebijakan, pemantauan dan pembinaan kepada pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.
2. Pengembangan sistem pelaporan secara online./aplikasi bagi pelaku usaha
3. Memberikan pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku usaha Industri, Koperasi, usaha mikro dan perdagangan.
4. penguatan infrastuktur logistik pangan serta melakukan penguatan kerjasama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan, utamanya pada komoditas daging ayam dan ikan tangkap
5. mendorong masyarakat untuk swasembada komoditi pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
6. Melakukan percepatan administrasi pelaksanaan peningkatan dan penyediaan sarana prasarana penunjang perekonomian Kota Pontianak.
7. mengoptimalkan peran dinas dalam pemantauan harga dan distribusi kebutuhan pokok melalui aplikasi terintegrasi
8. Mengubah manajemen pengelolaan pasar rakyat yang diarahkan untuk memenuhi standar SNI Pasar (SNI) 8152:201X.





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KOOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Aliyang No. 7C – Telepon / Fax : 0561 - 730416

PONTIANAK

Kode Pos : 78116

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

1. RUMUSAN RENSTRA TAHUN 2020 - 2024
2. RENSTRA PERUBAHAN TA 2021 - 2024
3. RUMUSAN RENCANA KERJA (Renja)
4. PENGUKURAN KINERJA (PK)
5. PERJANJIAN KINERJA (PK)





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)				
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Meningkatkan sektor perdagangan				1. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61%	14,61%	14,61%		14,61%		14,61%		14,61%		14,61%		14,61%				
				2. Volume ekspor (Ton)			554.354		570.005		575.906		580.360		610.880		610.880				
	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar		Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	5,88%	5,88%	5,88%	22.234.701.200	11,76%	5.620.395.600	11,76%	5.841.395.600	17,65%	5.951.395.600	17,65%	6.061.395.600	17,65%	6.061.395.600			
			Operasional UPTD Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	14 pasar	14 pasar	14 pasar		14 pasar		14 pasar		14 pasar		14 pasar		14 pasar				
			Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	9 pasar	9 pasar	9 pasar		9 pasar		9 pasar		9 pasar		9 pasar		9 pasar				
			Pengamanan dan Kebersihan Pasar	Jumlah Pasar rakyat yang aman dan bersih	17 pasar	17 pasar	17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar				
			Pemeliharaan dan Pembinaan pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat binaan yang dipelihara	17 pasar	17 pasar	17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar				
			Pembersihan Saluran Pasar Rakyat	Pembersihan saluran pasar	17 pasar	17 pasar	17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar		17 pasar				
			Registrasi dan Pendataan Objek retribusi	Persentase Tempat usaha yang diregistrasi	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Renovasi Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan	1 pasar	1 pasar	2 pasar		2 pasar		3 pasar		3 pasar		4 pasar		4 pasar				
	Meningkatnya pelaku ekspor		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	4%	4%	4%	19.584.150	4%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150	8%	19.584.150			
			Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API)	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina	25 Usaha	25 Usaha	25 Usaha		25 Usaha		50 Usaha		50 Usaha		50 Usaha		50 Usaha				





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)				
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Terkendalinya laju inflasi		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	100%	97.376.800	100%	99.136.800	100%	101.266.800	100%	102.376.830	100%	152.376.830	100%	152.376.830			
			Gelar Dagang Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi		25 usaha		25 usaha		25 usaha		25 usaha		25 usaha		25 usaha					
			Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya	jumlah laporan evaluasi ketersediaan sembako	12 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan				
			Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah	Stabilitas harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan				
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	956.123.815	100%	846.547.815	100%	841.547.815	100%	836.547.815	100%	786.547.815	100%	851.547.815			
			Fasilitasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya	Jumlah Operasi pasar murah	1 kali	1 kali	2 kali		3 kali		3 kali		4 kali		4 kali		4 kali				
			Pengawasan Barang Beredar	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 jenis	12 jenis	12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis		12 jenis				
			Operasional UPT Kemetrolgian Daerah	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	2250 UTTP	2250 UTTP	2500 UTTP		3000 UTTP		3500 UTTP		3600 UTTP		3700 UTTP		3700 UTTP				
			Peningkatan Sarana Prasarana UPT Metrologi Legal Kota Pontianak	Sarana prasarana UPT Metrologi Legal	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket				
			Pengawasan Kemetrolgian Daerah	Jumlah alat UTTP yang diawasi	2500 UTTP	2250 UTTP	2500 UTTP		3000 UTTP		3500 UTTP		3600 UTTP		3700 UTTP		3700 UTTP				
			Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan Standar Kemetrolgian Daerah	Jumlah peralatan standar yang diperihara dan verifikasi	100 UTTP	100 UTTP	100 UTTP		110 UTTP		120 UTTP		130 UTTP		150 UTTP		150 UTTP				





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)				
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2. Meningkatkan sektor industri				2. kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17%	16,17%	16,17%		16,17%		16,25%		16,25%		16,30%		16,30%				
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri baru		Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif	persentase pertumbuhan industri	2,00%	2,05%	2,09%	284.207.900	2,18%	676.864.850	2,36%	751.864.850	2,42%	916.864.850	2,50%	936.864.850	2,50%	936.864.850			
			Pelatihan dan Implementasi Teknis Desain Packaging	Jumlah industri yang dilatih						30 IKM/IRT		30 IKM/IRT		30 IKM/IRT		30 IKM/IRT					
			Perluasan Penerapan Haki dan Sertifikasi Halal Industri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi						30 IKM/IRT		30 IKM/IRT		30 IKM/IRT		30 IKM/IRT					
			Promosi dan Pameran Produk Industri kreatif	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosi			30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis		30 jenis				
			Pembinaan dan Pelatihan Industri	Jumlah industri yang dilatih			120 IKM/IRT		100 IKM/IRT		100 IKM/IRT		100 IKM/IRT		100 IKM/IRT		100 IKM/IRT				
			Pengujian dan Movev Produk Pangan	Jumlah Produk pangan yang diuji			20 produk 20 PIRT		40 produk 40 PIRT		40 produk 50 PIRT		40 produk 60 PIRT		40 produk 100 PIRT		40 produk 100 PIRT				
	Meningkatnya kelayakan perijinan industri		Program Pengembangan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Persentase kelayakan perijinan industri	90%	90%	90%	18.257.600	90%	18.257.600	92%	18.257.600	92%	68.257.600	93%	68.257.600	93%	68.257.600			
			Penguatan Jaringan Klaster Industri	Jumlah Jaringan Klaster									1 klaster		1 klaster		1 klaster				
			Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri	Jumlah industri yang di monitor dan di evaluasi			50 Industri		50 Industri		50 Industri		50 Industri		50 Industri		50 Industri				
	Meningkatnya sarana prasarana klaster industri produk unggulan		Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan			25%	-	25%	-	25%	150.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000	25%	250.000.000			
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan							3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis				





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokas
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro				1. Persentase Volume Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	4,00%	4,00%	4,00%		4,25%		4,50%		4,80%		4,90%		4,90%			
	Meningkatnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2. Prosentase Usaha mikro aktif	100,00%	100,00%	100,00%	100.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000	100,00%	350.000.000		
			Sosialisasi dan Fasilitasi Standarisasi Produk KUMKM	Jumlah KUMKM yang memiliki standarisasi/sertifikas i									50		50		50			
			Pelatihan Motivasi dan kewirausahaan pelaku usaha pemula	Jumlah Pelaku Usaha pemula yang dilatih		240	100		200		200		200		200		200			
	Meningkatnya sistem pendukung usaha bagi usaha mikro		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	persentase UKM non BPR /LKM aktif			88,25%	334.293.100	88,25%	240.540.000	89,98%	270.540.000	89,98%	257.540.000	91,71%	287.540.000	91,71%	287.540.000		
			Layanan Konsultasi Pengembangan Usaha KUMKM	Layanan konsultasi KUMKM									20 Usaha		20 Usaha		20 Usaha			
			Pengembangan Pemasaran berbasis IT	sistem e-commerce			1 paket		1 paket		1 paket				1 paket		1 paket			
			Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Jumlah pelaku usaha yang partisipasi dalam pameran			15 usaha		20 usaha		25 usaha		30 usaha		35 usaha		35 usaha			
			Pengelolaan/ Operasional Gedung UMKM	Operasional gedung UMKM					12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Pengadaan sarana prasarana gedung UMKM	Jumlah pelaku usaha yang partisipasi dalam pameran			15 usaha		20 usaha		25 usaha		30 usaha		35 usaha		35 usaha			





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Loka
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	meningkatnya iklim usaha mikro		Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	2. Prosentase Usaha mikro naik kelas	0,13%	0,19%	0,29%	224.206.500	0,47%	231.876.500	0,61%	261.876.500	0,69%	261.876.500	0,83%	261.876.500	0,83%	261.876.500		
			Sosialisasi dan pendampingan SHAT KUMKM	Jumlah KUMKM yang mendapat SHAT							15 unit		20 unit		25 unit		25 unit			
			Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Koperasi dan UMKM	Jumlah KUMKM yang dimonitoring							50 unit		70 unit		100 unit		100 unit			
			Pengembangan Sarana/Prasarana KUMKM	Jumlah Usaha mikro yang memiliki sarana prasarana standar	280 usaha	280 usaha			20 usaha		30 usaha		40 usaha		60 usaha		60 usaha			
			Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	Jumlah Koperasi dan Usaha mikro yang difasilitasi Pembiayaan	100 unit	100 unit	100 unit		100 unit		120 unit		120 unit		150 unit		150 unit			
	Meningkatnya Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	persentase koperasi aktif	95,40%	95,40%	95,40%	196.335.300	95,50%	233.081.900	95,50%	313.081.900	95,60%	283.081.900	95,60%	273.081.900	95,60%	273.081.900		
			Pengelolaan Data/Informasi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Updating Data KUMKM)	database koperasi dan usaha mikro			1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem		1 sistem			
			Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah koperasi baru		8	15		20		20		25		25		25			
			Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi Usaha Mikro Kecil yang dimonev		50	100		120		120		130		140		140			





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokas
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Motivasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Jumlah Koperasi yang dimotivasi		150	150		150		200		200		250		250			
			Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai		120	50		100		150		200		250		250			
	Meningkatnya Jumlah Pedagang Kreatif Lapangan binaan		Program Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	persentase kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat pembinaan	12%	12%	12%	217.540.000	13%	63.100.000	14%	63.100.000	15%	63.100.000	16%	63.100.000	16%	63.100.000		
			Penataan dan Pengendalian PKL	Jumlah wilayah PKL yang dibina			1 wilayah		1 wilayah		1 wilayah		1 wilayah		1 wilayah		1 wilayah			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		A	A	1.787.538.650	A	1.657.591.755	A	1.774.783.155	A	1.842.783.155	A	1.859.883.155	A	1.859.883.155		
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	pelunasan tagihan jasa Komunikasi, SDA dan listrik		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat kehadiran rapat, koordinasi, dan konsultasi		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa teknis administrasi perkantoran		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Jumlah jasa lain kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan			12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokas
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Peningkatan Sarana prasarana dan perlengkapan kantor	persentase kantor / bangunan milik pemerintah dalam kondisi baik		100%	100%	335.250.000	100%	735.250.000	100%	335.250.000	100%	335.250.000	100%	335.250.000	100%	335.250.000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan		1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Mobil Operasional			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor		1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		13,88%	19,44%	183.860.000	19,44%	220.000.000	27,77%	230.000.000	27,77%	240.000.000	27,77%	250.000.000	27,77%	250.000.000		
			Pendidikan dan pelatihan formal	Keikutsertaan kursus/bimtek/sejenisnya		15 orang	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang			
			Program Peningkatan Disiplin dan kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terkena sanksi pelanggaran disiplin yang dibina pada tahun berkenaan		100%	100%	59.590.000	100%	79.540.000	100%	89.540.000	100%	89.540.000	100%	89.540.000	100%	89.540.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dinas		75 stel	75 stel		75 stel		75 stel		75 stel		75 stel		75 stel			
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai SAKIP Kota Pontianak		A	A	45.250.000	A	40.250.000	A	45.250.000	A	40.250.000	A	45.250.000	A	45.250.000		
			Penyusunan Rencana Kerja	RENJA, RKA, RKA-P, RKT		4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan			
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	LaKIP, LPPD, SPIP, data LKPJ		4 laporan	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan			
			Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Laporan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan			1 laporan				1 laporan				1 laporan		1 laporan			





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaaan (2018)	rencana Capaian tahun 2019	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokas
							2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
							target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Pengembangan data/informasi	Nilai SAKIP Kota Pontianak		A	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000	A	6.000.000		
			Penyusunan data dan Profil OPD	Data dan Profil OPD		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			Program Peningkatan Pelayanan Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		A	A	4.072.000	A	5.622.000	A	5.622.000	A	5.622.000	A	5.622.000	A	5.622.000		
			Penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat		A	A		A		A		A		A		A			
			Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	WTP	8.450.000	sekretariat	
			Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan		1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			Program Pengembangan Sistem Informasi	persentase web perangkat daerah dan web unit kerja di bawah perangkat daerah dalam kondisi baik dan ter update			100%	15.000.000	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000		
			Pengelolaan Website SKPD	website OPD terupdate			100%		100%		100%		100%		100%		100%			
								27.109.379.415		10.993.831.370		11.284.152.770		11.905.262.800		12.152.362.800		12.152.362.800		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Meningkatkan sektor perdagangan				1. kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61%	14,61%	3.068.898.850	14,61%	3.526.129.600	14,61%	3.266.723.550	14,61%	3.974.221.150	14,61%	3.974.221.150		
	Meningkatnya Pasar Rakyat Binaan yang memenuhi SNI Pasar			Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar		5,88%	2.480.504.350	11,76%	2.680.504.350	11,76%	2.321.191.000	11,76%	2.665.191.000	11,76%	2.665.191.000		
		03.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatan	8,82%	11,76%	2.480.504.350	35,29%	2.680.504.350	44,12%	2.321.191.000	50,00%	2.665.191.000	50,00%	2.665.191.000		
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	41%	47%	2.121.464.350	47%	2.281.464.350	50%	2.125.197.000	56%	2.468.197.000	56%	2.468.197.000		
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana Pasar Rakyat yang tersedia	2 pasar	6 pasar	774.292.350	2 pasar	794.292.350	2 pasar	515.997.000	2 pasar	658.997.000	2 pasar	658.997.000		
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang difasilitasi pengelolaan	17 pasar	17 pasar	1.347.172.000	17 pasar	1.487.172.000	17 pasar	1.609.200.000	17 pasar	1.809.200.000	17 pasar	1.809.200.000		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko swalayan			359.040.000		399.040.000		195.994.000		196.994.000		196.994.000		
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Yang dibina UPTD Pasar Tradisional dan Jasa Usaha Pasar	23 pasar	23 pasar	123.270.000	23 pasar	143.270.000	23 pasar	29.925.000	23 pasar	30.925.000	23 pasar	30.925.000		
		3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang diberdayakan	23 pasar	23 pasar	235.770.000	23 pasar	255.770.000	23 pasar	166.069.000	23 pasar	166.069.000	23 pasar	166.069.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Terkendalinya Laju Inflasi			Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	100%	100%	173.969.400	100%	250.909.150	100%	304.070.150	100%	498.615.150	100%	498.615.150		
		03.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100%	100%	79.940.950	100%	112.440.950	100%	139.440.950	100%	153.840.950	100%	153.840.950		
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perijinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin : a. Pusat perbelanjaan dan b. Toko	14 pasar	14 pasar	-	14 pasar	2.500.000	14 pasar	2.500.000	14 pasar	3.500.000	14 pasar	3.500.000		
		3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan				2 kali	2.500.000	2 kali	2.500.000	2 kali	3.500.000	2 kali	3.500.000		
		3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan TDG			-		2.500.000		2.500.000		3.500.000		3.500.000		
		3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Fasilitasi Penerbitan TDG				2 semester	2.500.000	2 semester	2.500.000	2 semester	3.500.000	2 semester	3.500.000		
		3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW Dalam Negeri yang tepat waktu			-		5.000.000		10.000.000		14.000.000		14.000.000		
		3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi STPW dalam Negeri				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		
		3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Komitmen STPW dalam Negeri				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW Luar Negeri yang tepat waktu			-		5.000.000		10.000.000		14.000.000		14.000.000		
		3.30.02.2.04.01	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan STPW terintegrasi secara elektronik Luar Negeri				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		
		3.30.02.2.04.02	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Lanjutan STPW Luar Negeri				1 kali	2.500.000	1 kali	5.000.000	1 kali	7.000.000	1 kali	7.000.000		
		3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C			-		2.500.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		
		3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah fasilitas Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C				1 kali	2.500.000	1 kali	5.000.000	1 kali	7.000.000	1 kali	7.000.000		
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota			79.940.950		89.940.950		94.440.950		96.840.950		96.840.950		
		3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Pemeriksaan Penyimpanan bahan berbahaya				1 kali	2.500.000	1 kali	5.000.000	1 kali	7.000.000	1 kali	7.000.000		
		3.30.02.2.06.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2				1 kali	2.500.000	1 kali	2.500.000	1 kali	2.500.000	1 kali	2.500.000		
		3.30.02.2.06.03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah barang beredar yang diawasi	12 item	12 item	79.940.950	12 item	84.940.950	12 item	86.940.950	12 item	87.340.950	12 item	87.340.950		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gjawab	Lokas
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu			-		5.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
		3.30.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA				2 kali	5.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000		
		03.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	83%	83%	94.028.450	92%	138.468.200	92%	164.629.200	100%	344.774.200	100%	344.774.200		
				2. Persentase kinerja realisasi pupuk	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
		3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jangka waktu Jaminan ketersediaan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 bulan	12 bulan	3.900.000	12 bulan	20.900.000	12 bulan	22.800.000	12 bulan	108.105.000	12 bulan	108.105.000		
		3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok				2 kali	5.000.000	2 kali	5.000.000	2 kali	45.600.000	2 kali	45.600.000		
		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting				2 kali	5.000.000	2 kali	5.000.000	2 kali	15.000.000	2 kali	15.000.000		
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jangka waktu pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakvat	12 bulan	12 bulan	3.900.000	12 bulan	10.900.000	12 bulan	12.800.000	12 bulan	47.505.000	12 bulan	47.505.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	< 5%	< 5%	90.128.450	< 5 %	107.568.200	< 4 %	119.829.200	< 4 %	184.669.200	< 4 %	184.669.200		
		3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 bulan			12 bulan	5.500.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	20.670.000	12 bulan	20.670.000		
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jangka waktu Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 bulan		83.888.450	12 bulan	89.619.200	12 bulan	90.619.200	12 bulan	90.789.200	12 bulan	90.789.200		
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi pasar	1 kali		6.240.000	2 kali	12.449.000	2 kali	23.210.000	2 kali	73.210.000	2 kali	73.210.000		
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi				2 semester	10.000.000	2 semester	22.000.000	2 semester	52.000.000	2 semester	52.000.000		
		3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jangka waktu Kelengkapan legalitas dokumen perijinan pupuk dan pestisida bersubsidi yang diperiksa				12 bulan	5.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000		
		3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jangka waktu Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				2 semester	2.500.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000	2 semester	7.000.000		
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jangka waktu Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				2 semester	2.500.000	2 semester	5.000.000	2 semester	25.000.000	2 semester	25.000.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Volume usaha Ekspor			Volume Ekspor (ton)	554.354	554.354	39.458.750	575.906	170.468.400	580.360	189.757.400	610.880	242.650.000	610.880	242.650.000		
		03.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pelaku Usaha ekspor yang dibina	24%	39%	39.458.750	24%	170.468.400	27%	189.757.400	38%	242.650.000	38%	242.650.000		
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang		1 kali	39.458.750	1 kali	170.468.400	1 kali	189.757.400	4 kali	242.650.000	4 kali	242.650.000		
		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang dibina		75 usaha	39.458.750	10 usaha	59.958.750	10 usaha	60.958.750	30 usaha	61.500.000	30 usaha	61.500.000		
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran Dagang Nasional yang diikuti				1 kali	25.661.000	1 kali	30.150.000	1 kali	30.150.000	1 kali	30.150.000		
		3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal yang diikuti				1 kali	40.000.000	1 kali	45.800.000	1 kali	46.000.000	1 kali	46.000.000		
		3.30.05.2.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Misi Dagang yang dilaksanakan				1 kali	16.848.650	1 kali	19.848.650	1 kali	35.000.000	1 kali	35.000.000		
		3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk ekspor yang akan ditingkatkan citranya				5 produk	14.500.000	5 produk	14.500.000	5 produk	35.000.000	5 produk	35.000.000		
		3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha ekspor yang dibina				30 usaha	13.500.000	30 usaha	18.500.000	30 usaha	35.000.000	30 usaha	35.000.000		
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	100%	100%	365.466.350	100%	396.447.700	100%	411.805.000	100%	427.865.000	100%	427.865.000		
		03.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	96%	97%	365.466.350	97%	396.447.700	98%	411.805.000	99%	427.865.000	99%	427.865.000		
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%	100%	365.466.350	100%	396.447.700	100%	411.805.000	100%	427.865.000	100%	427.865.000		
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jangka waktu pelaksanaan Metrologi Legal	12 bulan	12 bulan	365.466.350	12 bulan	378.071.700	12 bulan	390.900.000	12 bulan	395.900.000	12 bulan	395.900.000		
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jangka waktu pengawasan Metrologi Legal	12 bulan			12 bulan	9.876.000	12 bulan	11.905.000	12 bulan	11.965.000	12 bulan	11.965.000		
		3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jangka waktu pelaksanaan penyidikan Metrologi Legal	12 bulan			12 bulan	8.500.000	12 bulan	9.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatnya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			Persentase Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		40%	9.500.000	40%	27.800.000	50%	39.900.000	60%	139.900.000	60%	139.900.000		
		03.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri pada event rapat/sosialisasi/kegiatan sejenis.	100%	100%	9.500.000	100%	27.800.000	100%	39.900.000	100%	139.900.000	100%	139.900.000		
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jangka waktu Pelaksanaan Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	12 bulan	12 bulan	9.500.000	12 bulan	27.800.000	12 bulan	39.900.000	12 bulan	139.900.000	12 bulan	139.900.000		
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri		1 kali	9.500.000	2 kali	15.500.000	2 kali	26.900.000	2 kali	94.900.000	2 kali	94.900.000		
		3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				1 kali	7.800.000	1 kali	8.000.000	2 kali	25.000.000	2 kali	25.000.000		
		3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan yang tersedia				1 kali	4.500.000	1 kali	5.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000		
2. Meningkatnya sektor industri				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17%	16,17%	486.879.690	16,25%	603.778.850	16,25%	744.228.250	16,30%	771.432.050	16,30%	771.432.050		
	Meningkatnya sarana prasarana klaster industri			persentase peningkatan jumlah sarana prasarana klaster industri	25%	25%	471.820.090	26%	532.701.050	27%	654.910.050	28%	601.418.050	28%	601.418.050		
		03.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RP/IN yang ditetapkan dalam RP/IN	100%	100%	471.820.090	100%	532.701.050	100%	654.910.050	100%	601.418.050	100%	601.418.050		
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesalkannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	471.820.090	100%	532.701.050	100%	654.910.050	100%	601.418.050	100%	601.418.050		
		3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RIPIK	1 dokumen			1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen		1 dokumen			
		3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	12 bulan	12 bulan	49.138.500	12 bulan	60.138.500	12 bulan	60.138.500	12 bulan	65.138.500	12 bulan	65.138.500		
		3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosikan	30 produk	40 produk	286.331.550	40 produk	286.331.550	50 produk	289.331.550	60 produk	299.831.550	60 produk	299.831.550		
		3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Industri yang diberdayakan	7 Industri		77.780.000	8 Industri	107.780.000	9 Industri	127.789.000	12 Industri	128.789.000	12 Industri	128.789.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Industri yang diarah	20 industri		68.570.040	25 industri	65.951.000	22 industri	67.651.000	22 industri	107.659.000	22 industri	107.659.000		
		3.31.02.2.01.06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan RPK				100%	7.500.000	1 kali	20.000.000						
	Meningkatnya kelayakan perijinan industri	03.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase industri yang memenuhi kelayakan perizinan	90%	90%	3.300.000	90%	13.042.600	90%	14.783.000	90%	26.783.000	90%	26.783.000		
				1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota	1. 2,47%	1. 2,47%	3.300.000	1. 2,5%	13.042.600	1. 2,6%	14.783.000	1. 2,6%	26.783.000	1. 2,6%	26.783.000		
				2. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	2. 64,85%	2. 64,85%		2. 65%		2. 70%		2. 75%		2. 75%			
				03. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perizinan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3. 100%	3. 100%		3. 100%		3. 100%		3. 100%		3. 100%			
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%	100%	3.300.000	100%	13.042.600	100%	14.783.000	100%	26.783.000	100%	26.783.000		
		3.31.03.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Komitmen Perolehan (IUI)	12 bulan	12 bulan		12 bulan	8.900.000	12 bulan	10.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	12.500.000		
		3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI)	12 bulan	12 bulan	3.300.000	12 bulan	4.142.600	12 bulan	4.283.000	12 bulan	14.283.000	12 bulan	14.283.000		
	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Baru	03.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pertumbuhan industri	2,18%	2,18%	11.759.600	2,36%	58.035.200	2,42%	74.535.200	2,50%	143.231.000	2,50%	143.231.000		
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1 dokumen	1 dokumen	11.759.600	1 dokumen	58.035.200	1 dokumen	74.535.200	1 dokumen	143.231.000	1 dokumen	143.231.000		
				Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam Sili Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri di kab/kota	7%	7%	11.759.600	14%	58.035.200	27%	74.535.200	41%	143.231.000	41%	143.231.000		
		3.31.04.2.01.01	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	12 bulan	12 bulan	11.759.600	12 bulan	18.019.050	12 bulan	19.519.050	12 bulan	19.736.000	12 bulan	19.736.000		
		3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri	1 Kali	1 Kali	10.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000	1 Kali	20.000.000		
		3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINAS	Jumlah Industri yang dimonev				100 unit	30.016.150	100 unit	36.016.150	100 unit	103.495.000	100 unit	103.495.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)										Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Koperasi yang berkualitas	4,00%	4,00%	475.978.867	4,50%	494.055.570	4,80%	534.397.970	4,90%	541.318.000	4,90%	541.318.000		
				Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%	100%	267.376.000	100%	359.391.500	100%	433.800.500	100%	478.970.000	100%	478.970.000		
	Meningkatnya Koperasi yang Aktif			persentase koperasi aktif	95,40%	95,40%	475.978.867	95,80%	494.055.570	96%	534.397.970	97%	541.318.000	97%	541.318.000		
		02.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Peningkatan Izin Usaha Simpan Pinjam	0,96%	0,57%	5.260.100	0,96%	10.260.100	1,15%	18.000.000	1,53%	21.000.000	1,53%	21.000.000		
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		100%	5.260.100	100%	5.260.100	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000		
		2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan/fasilitasi Perizinan	12 bulan	12 bulan	5.260.100	12 bulan	5.260.100	12 bulan	6.000.000	12 bulan	7.000.000	12 bulan	7.000.000		
		2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantuan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		-	100%	5.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000			
		2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan/Penerbitan Perizinan	12 bulan			12 bulan	5.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000		
		02.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	19%	19%	60.985.500	19%	64.661.750	29%	73.054.250	38%	73.054.000	38%	73.054.000		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		19%	60.985.500	19%	64.661.750	29%	73.054.250	38%	73.054.000	38%	73.054.000		
		2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Koperasi	12 bulan	12 bulan	35.856.000	12 bulan	37.532.250	12 bulan	37.975.250	12 bulan	37.975.000	12 bulan	37.975.000		
		2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Koperasi	12 bulan	12 bulan	25.129.500	12 bulan	27.129.500	12 bulan	35.079.000	12 bulan	35.079.000	12 bulan	35.079.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		02.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	16,67%	8,33%	4.494.814	16,67%	13.895.000	22,22%	22.895.000	22,50%	24.949.000	22,50%	24.949.000		
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaanya dalam daerah kabupaten/kota		3%	4.494.814	33%	13.895.000	49%	22.895.000	54%	24.949.000	54%	24.949.000		
		2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12 bulan	12 bulan	4.494.814	12 bulan	8.895.000	12 bulan	10.895.000	12 bulan	12.949.000	12 bulan	12.949.000		
		2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Penghargaan Kesehatan KSP/USP				10 unit	5.000.000	10 unit	12.000.000	10 unit	12.000.000	10 unit	12.000.000		
		02.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	19%	31%	394.448.639	19%	394.448.720	23%	394.448.720	29%	396.315.000	29%	396.315.000		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	29%	31%	394.448.639	31%	394.448.720	33%	394.448.720	36%	396.315.000	36%	396.315.000		
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	5. Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	20 unit	160 unit	394.448.639	200 unit	394.448.720	200 unit	394.448.720	30 unit	396.315.000	30 unit	396.315.000		
		02.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10%	10%	10.789.814	10%	10.790.000	14%	26.000.000	19%	26.000.000	19%	26.000.000		
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8. persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	4%	2%	10.789.814	5%	10.790.000	5%	26.000.000	6%	26.000.000	6%	26.000.000		
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8. Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	40 unit	40 unit	10.789.814	40 unit	10.790.000	50 unit	26.000.000	50 unit	26.000.000	50 unit	26.000.000		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n													Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokas
						2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro			Persentase Pertumbuhan usaha mikro baru	4,22%	4,22%	267.376.000	4,30%	359.391.500	4,50%	433.800.500	5%	478.970.000	5%	478.970.000				
		02.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	5%	3%	27.690.000	5%	119.705.500	9%	148.425.500	12%	181.595.000	12%	181.595.000				
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	2%	1%	27.690.000	3%	119.705.500	3%	148.425.500	4%	181.595.000	4%	181.595.000				
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Jumlah wirausaha baru yang berskala mikro		30 usaha	27.690.000	50 usaha	58.600.000	50 usaha	60.615.000	50 usaha	61.615.000	50 usaha	61.615.000				
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	3. Jumlah usaha mikro yang bemitra				20 usaha	15.000.000	20 usaha	22.005.000	20 usaha	52.005.000	20 usaha	52.005.000				
		2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	2. Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)				100 izin	5.000.000	110 izin	13.000.000	120 izin	15.000.000	120 izin	15.000.000				
		2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4. Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha				15 usaha	12.000.000	15 usaha	23.000.000	15 usaha	23.000.000	15 usaha	23.000.000				
		2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	jangka waktu Koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan Usaha Mikro	12 bulan			12 bulan	29.105.500	12 bulan	29.805.500	12 bulan	29.975.000	12 bulan	29.975.000				
		02.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	3%	2%	239.686.000	3%	239.686.000	5%	285.375.000	7%	297.375.000	7%	297.375.000				
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5. persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	1%	1%	239.686.000	3%	239.686.000	3%	285.375.000	4%	297.375.000	4%	297.375.000				
		2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5. jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	10 Usaha	40 usaha	239.686.000	40 Usaha	239.686.000	14 Usaha	285.375.000	16 Usaha	297.375.000	16 Usaha	297.375.000				





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						1	2	3	4	5	6	10	11	12	13		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan Pemerintahan Daerah	90%	90%	11.655.666.593	90%	12.088.970.379	90%	12.673.557.822	90%	12.515.825.652	90%	12.515.825.652		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	12 dok/lap	12 dok/lap	19.805.000	12 dok/lap	13.567.500	12 dok/lap	13.567.500	12 dok/lap	14.655.000	12 dok/lap	14.655.000		
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	7.750.000	400%	6.200.000	400%	6.200.000	400%	6.200.000	400%	6.200.000		
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	60 kegiatan	50 sub kegiatan	1.550.000	50 sub kegiatan	1.550.000	50 sub kegiatan	1.550.000	50 sub kegiatan	1.550.000	50 sub kegiatan	1.550.000		
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	40 kegiatan	40 sub kegiatan	1.550.000	40 sub kegiatan	1.550.000	40 sub kegiatan	1.550.000	40 sub kegiatan	1.550.000	40 sub kegiatan	1.550.000		
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	2 laporan	2 laporan	2.175.000	300%	3.262.500	300%	3.262.500	300%	4.350.000	300%	4.350.000		
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 laporan	2 laporan	6.780.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	10.600.576.363	12 bulan	10.664.550.000	12 bulan	10.763.510.000	12 bulan	10.879.760.000	12 bulan	10.879.760.000		
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	10.138.826.363	12 bulan	10.163.000.000	12 bulan	10.263.000.000	12 bulan	10.379.250.000	12 bulan	10.379.250.000		
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	12 bulan											
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	459.600.000	12 bulan	490.800.000	12 bulan	492.050.000	12 bulan	492.050.000	12 bulan	492.050.000		
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	12 bulan		12 bulan	2.150.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000		
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.150.000	1 Laporan	2.150.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000	100%	1.005.000		
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan	1 Bahan	1 Bahan		1 Bahan	2.150.000	1 Bahan	2.150.000	1 Bahan	2.150.000	1 Bahan	2.150.000		
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 laporan	2 laporan		2 laporan	2.150.000	2 laporan	2.150.000	2 laporan	2.150.000	2 laporan	2.150.000		
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	1 laporan		1 laporan	2.150.000	1 laporan	2.150.000	1 laporan	2.150.000	1 laporan	2.150.000		
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	11.150.000	12 bulan	11.150.000	12 bulan	11.150.000	12 bulan	11.150.000	12 bulan	11.150.000		
		X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.550.000	1 dokumen	1.550.000	1 dokumen	1.550.000	1 dokumen	1.550.000	1 dokumen	1.550.000		
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jangka Waktu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.600.000	12 bulan	9.600.000		
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-	12 bulan	-		
		X.XX.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan retribusi daerah	1 dokumen												
		X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data retribusi yang diolah	Data												





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaian	62 ASN	60 ASN	39.860.000	60 ASN	108.900.000	60 ASN	140.850.000	60 ASN	175.478.400	60 ASN	175.478.400		
		X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang ditingkatkan	unit					3 unit	15.000.000						
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	70 stel	60 stel	39.860.000	120 stel	79.720.000	120 stel	79.720.000	120 stel	79.720.000	120 stel	79.720.000		
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	10 orang			10 orang	12.000.000	10 orang	28.950.000	10 orang	78.578.400	10 orang	78.578.400		
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	1 kali sosialisasi			2 kali sosialisasi	17.180.000	2 kali sosialisasi	17.180.000	2 kali sosialisasi	17.180.000	2 kali sosialisasi	17.180.000		
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	orang												
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	291.002.830	12 bulan	355.782.800	12 bulan	470.372.000	12 bulan	494.738.852	12 bulan	494.738.852		
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	7.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.238.000	12 bulan	7.238.000	12 bulan	7.238.000		
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	121.429.330	12 bulan	131.929.300	12 bulan	137.900.000	12 bulan	177.900.000	12 bulan	177.900.000		
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	unit		6.500.000		6.500.000		6.500.000						
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan			12 bulan	16.280.000	12 bulan	18.280.000	12 bulan	18.280.000	12 bulan	18.280.000		
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		64.140.000	12 bulan	65.140.000	12 bulan	72.300.000	12 bulan	72.300.000	12 bulan	72.300.000		
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan		11.760.000	12 bulan	12.860.000	12 bulan	12.965.000	12 bulan	12.965.000	12 bulan	12.965.000		
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan			14.900.000		16.800.000		18.800.000		18.800.000		18.800.000		
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	12 bulan			12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.600.000	12 bulan	15.600.000	12 bulan	15.600.000		
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan		43.673.500	12 bulan	43.673.500	12 bulan	136.189.000	12 bulan	138.189.000	12 bulan	138.189.000		
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditatausahakan				12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000		
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka Waktu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12 bulan	21.600.000	12 bulan	21.600.000	12 bulan	25.600.000	12 bulan	15.466.852	12 bulan	15.466.852		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12 unit	69.860.000	12 unit	177.660.000	12 unit	504.674.922	12 unit	169.810.000	12 unit	169.810.000		
		X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						1 unit	306.964.922						
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan													
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel		4 unit	9.000.000	6 unit	25.900.000	6 unit	29.900.000						





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya				1 unit	36.900.000	1 unit	38.300.000	1 unit	40.300.000	1 unit	40.300.000		
		X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud													
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				2 unit	45.000.000	2 unit	49.650.000	2 unit	49.650.000	2 unit	49.650.000		
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		8 unit	60.860.000	10 unit	69.860.000	10 unit	79.860.000	10 unit	79.860.000	10 unit	79.860.000		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	12 bulan	447.498.400	12 bulan	448.698.400	12 bulan	470.893.400	12 bulan	471.693.400	12 bulan	471.693.400		
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan			12 bulan	1.200.000	12 bulan	1.200.000						
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan		366.600.000	12 bulan	366.600.000	12 bulan	376.600.000	12 bulan	376.600.000	12 bulan	376.600.000		
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa perlengkapan kantor	12 bulan		3.960.000	12 bulan	3.960.000	12 bulan	6.155.000	12 bulan	7.155.000	12 bulan	7.155.000		
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan		76.938.400	12 bulan	76.938.400	12 bulan	86.938.400	12 bulan	87.938.400	12 bulan	87.938.400		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	unit	unit	175.914.000	unit	308.661.679	unit	298.540.000	unit	298.540.000	unit	298.540.000		
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000	1 unit	34.140.000		
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	12 bulan		5.392.000	12 bulan	39.532.000	12 bulan	39.535.000	12 bulan	39.535.000	12 bulan	39.535.000		
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 bulan			12 bulan	61.157.679	12 bulan	65.733.000	12 bulan	65.733.000	12 bulan	65.733.000		
		X.XX.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara				12 bulan	37.000.000	12 bulan	19.300.000	12 bulan	19.300.000	12 bulan	19.300.000		
		X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tetap tak berwujud yang dipelihara				1 aplikasi	25.000.000	1 aplikasi	25.000.000	1 aplikasi	25.000.000	1 aplikasi	25.000.000		
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 unit	51.682.000	2 unit	51.682.000	2 unit	52.682.000	2 unit	52.682.000	2 unit	52.682.000		
		X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10 unit	51.500.000	10 unit	35.150.000	10 unit	37.150.000	10 unit	37.150.000	10 unit	37.150.000		
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10 unit	33.200.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000		
							15.954.800.000		17.072.325.889		17.652.708.092		18.281.766.852		18.281.766.852		





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

RUMUSAN RENCANA KERJA								
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020								
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK								
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2020								
NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA			
					APBD KOTA	APBN / DAK	PARTISIPASI MASY	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas	A	1.493.284.650	-	-	1.493.284.650
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Pelunasan tagihan jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Dinas	12	Rp 337.002.000			337.002.000
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	Dinas	12	Rp 60.360.000			60.360.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Dinas	12	Rp 68.860.000			68.860.000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik dan elektronika	Dinas	12	Rp 7.000.000			7.000.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan	Dinas	12	Rp 11.760.000			11.760.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman rapat dan tamu	Dinas	12	Rp 14.900.000			14.900.000
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tingkat kehadiran rapat, koordinasi dan konsultasi	Dinas	12	Rp 128.833.050			128.833.050
8	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Jasa teknis administrasi perkantoran	Dinas	12	Rp 2.740.000			2.740.000
9	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Dinas	12	Rp 316.013.600			316.013.600
10	Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	Dinas	12	Rp 473.160.000			473.160.000
11	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan	Dinas	1 kali	Rp 72.656.000			72.656.000
2	Program Peningkatan Sarana prasarana dan perlengkapan kantor	persentase kantor / bangunan milik pemerintah dalam kondisi baik	Dinas	A	389.053.100	-	-	394.103.100
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan	Dinas	1 paket	25.140.000			25.140.000
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Dinas	12	34.040.000			34.040.000
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Inventaris Kantor	Pemeliharaan Inventaris Kantor	Dinas	12	63.080.000			63.080.000
4	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan kantor	Dinas	1 paket	266.793.100			266.793.100
5	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas	12 Bulan	5.050.000			5.050.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Dinas	19,44%	27.790.000	-	-	27.790.000
1	Pendidikan dan pelatihan formal	Keikutsertaan kursus/bimtek/sejenisnya	Dinas	70 orang	27.790.000			27.790.000
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai SAKIP Kota Pontianak	Dinas	A	3.050.000	-	-	3.050.000
1	Penyusunan Rencana Kerja	RENJA, RKA, RKA-P, RKT	Dinas	8 laporan	1.750.000			1.750.000
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	LaKIP, LPPD, SPIP, data LKPJ	Dinas	4 laporan	1.300.000			1.300.000





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA			
					APBD KOTA	APBN / DAK	PARTISIPASI MASY	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	10
5	Program Peningkatan Disiplin dan kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang terkena sanksi pelanggaran disiplin yang dibina pada tahun berkenaan	Dinas	100%	61.610.000	-	-	61.610.000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Pakaian Dinas dan Batik	Dinas	70 stel	61.610.000			61.610.000
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dinas	WTP	650.000	-	-	650.000
1	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Dinas	1 laporan	650.000			650.000
7	Program Peningkatan Pelayanan Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas	A	372.000	-	-	372.000
1	Penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas	A	372.000			372.000
8	Program Pengembangan data/informasi	Nilai SAKIP Kota Pontianak	Dinas	A	800.000	-	-	800.000
1	Penyusunan data dan Profil OPD	Data dan Profil OPD	Dinas	1 laporan	800.000			800.000
9	Program Pengembangan Sistem Informasi	persentase web perangkat daerah dan web unit kerja di bawah perangkat daerah dalam kondisi baik dan ter update	Dinas	100%	18.460.000	-	-	18.460.000
1	Pengelolaan Website SKPD	website OPD terupdate	Dinas	100%	18.460.000			18.460.000
10	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2. Prosentase Usaha mikro aktif	Kota Pontianak	88,25%	93.270.000	-	-	93.270.000
1	Pelatihan Motivasi dan kewirausahaan pelaku usaha pemula	Jumlah Pelaku Usaha pemula yang dilatih	Kota Pontianak	200	93.270.000			93.270.000
11	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	persentase UKM non BPR /LKM aktif	Kota Pontianak	88,25%	351.752.000	-	-	351.752.000
1	Pengembangan Pemasaran berbasis IT	sistem e-commerce	Kota Pontianak		61.030.000			61.030.000
2	Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Jumlah pelaku usaha yang partisipasi dalam pameran	UMKM		290.722.000			290.722.000
12	Program Peningkatan Iklim Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)	2. Prosentase Usaha mikro naik kelas	Kota Pontianak	0,29%	31.015.500	-	-	31.015.500
1	Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	Jumlah Koperasi dan Usaha mikro yang difasilitasi Pembiayaan	Kota Pontianak	100 unit	31.015.500			31.015.500
13	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	persentase koperasi aktif	Kota Pontianak	95,40%	44.585.550	417.358.000	-	461.943.550
1	Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah koperasi baru	Kota Pontianak	15	300.000			300.000
2	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi Usaha Mikro Kecil yang dimonev	Kota Pontianak	100	10.555.250			10.555.250
3	Motivasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Jumlah Koperasi yang dimotivasi		150	33.730.300			33.730.300
4	Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai	Kota Pontianak	50	-	417.358.000		417.358.000
14	Program Pembinaan Pedagang Kreatif Lapangan	persentase kelompok pedagang / usaha informal yang mendapat pembinaan	Kota Pontianak	12%	160.740.000	-	-	160.740.000
1	Penataan dan Pengendalian PKL	Jumlah wilayah PKL yang dibina	Kota Pontianak	1,00%	160.740.000			160.740.000
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku ekspor dan impor yang dibina	Kota Pontianak	26%	5.204.150	-	-	5.204.150
1	Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API)	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina	dalam dan luar daerah	25 Usaha	5.204.150			5.204.150





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	SUMBER DANA			
					APBD KOTA	APBN / DAK	PARTISIPASI MASY	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	10
16	Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Rakyat	Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	Kota Pontianak	5,88%	7.498.094.700	-	-	7.498.094.700
1	Operasional UPTD Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	Kota Pontianak	14 pasar	12.110.000			12.110.000
2	Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	Kota Pontianak	7 pasar	14.900.000			14.900.000
3	Pengamanan dan Kebersihan Pasar	Jumlah Pasar rakyat yang aman dan bersih	Kota Pontianak	17 pasar	1.467.443.600			1.467.443.600
4	Pemeliharaan dan Pembinaan pasar rakyat	Jumlah pasar rakyat binaan yang dipelihara	Kota Pontianak	14 pasar	1.026.930.000			1.026.930.000
5	Pembersihan Saluran Pasar Rakyat	Pembersihan saluran pasar	Kota Pontianak	11 pasar	110.220.000			110.220.000
6	Registrasi dan Pendataan Objek retribusi	Persentase Tempat usaha yang diregistrasi	Kota Pontianak	100%	159.627.200			159.627.200
7	Renovasi Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan	Kota Pontianak	1 paket	4.706.863.900			4.706.863.900
17	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Kota Pontianak	95%	167.977.800	-	-	167.977.800
1	Gelar Dagang Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Kota Pontianak	25 usaha	145.361.000			145.361.000
2	Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya	jumlah laporan evaluasi ketersediaan sembako		12 bulan	7.157.300			7.157.300
3	Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah	Terkendalinya harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya	Kota Pontianak	12 bulan	15.459.500			15.459.500
18	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	Kota Pontianak	90%	511.137.700	-	-	511.137.700
1	Fasilitasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya	Jumlah Operasi pasar murah	Kota Pontianak	2 kali	22.349.000			22.349.000
2	Operasional UPT Kemetrolgian Daerah	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Kota Pontianak	2250 UTTP	376.071.700			376.071.700
3	Pengawasan Barang Beredar	Jumlah barang beredar yang diawasi	Kota Pontianak	12 jenis	53.141.000			53.141.000
	Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan Standar Kemetrolgian Daerah	Jumlah peralatan standar yang diperihara dan verifikasi	Kota Pontianak	100 UTTP	59.576.000			59.576.000
19	Program Pengembangan IKM dan Industri	persentase cakupan bina kelompok pengrajin	Kota Pontianak	90%	382.728.000	-	-	382.728.000
1	Promosi dan Pameran Produk Industri kreatif	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosi			287.659.000			287.659.000
2	Pembinaan dan Pelatihan Industri	Jumlah industri yang dilatih		420	47.937.000			47.937.000
3	Pengujian dan Monev Produk Pangan	Jumlah Produk pangan yang diuji	Kota Pontianak	20 produk 100 PIRT	47.132.000			47.132.000
20	Program Pengembangan Industri Kimia agro dan Hasil Hutan (IKAHH)	Persentase kelayakan perijinan industri	Kota Pontianak	90%	4.142.600	-	-	4.142.600
1	Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri	Jumlah industri yang di monitor dan di evaluasi	Kota Pontianak	50 Industri	4.142.600			4.142.600
21	Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka	Persentase sarana prasarana klaster industri produk unggulan	Kota Pontianak		79.651.000	-	-	79.651.000
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan	Kota Pontianak		79.651.000			79.651.000
TOTAL					11.324.996.750	417.358.000	-	11.747.776.750





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

PENGUKURAN KINERJA (P K)														
SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK														
TAHUN ANGGARAN : 2020														
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	KEGIATAN						ANGGARAN		
						URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	14,61	17,88	122	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tradisional		Persentase Pasar rakyat binaan yang memenuhi SNI pasar	Persen	5,88	5,88	100	Rp 3.710.458.100	Rp 3.563.920.192	96
						Pengamanan dan Kebersihan Pasar	Jumlah pasar rakyat yang aman dan bersih	Pasar	17	17	100	Rp 1.552.041.525	Rp 1.549.370.292	100
						Registrasi dan Pendataan Objek retribusi	Persentase tempat usaha yang diregistrasi	Pasar	100	100	100	Rp 43.169.425	Rp 43.162.100	100
						Operasional UPTD Jasa Usaha Pasar	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	Pasar	9	9	100	Rp 5.741.425	Rp 5.739.400	100
						Operasional UPTD Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibina oleh UPTD	Pasar	14	14	100	Rp 3.741.925	Rp 3.739.000	100
						Pembersihan Saluran Pasar Rakyat	Jumlah saluran pasar rakyat binaan dalam keadaan bersih	Pasar	17	17	100	Rp 64.732.900	Rp 64.731.600	100
						Renovasi Pasar	Jumlah sarana prasarana pasar rakyat binaan	Pasar	2	2	100	Rp 726.369.000	Rp 725.086.800	100
						Pemeliharaan dan Pembinaan Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat binaan yang dipelihara	Pasar	17	17	100	Rp 1.314.661.900	Rp 1.172.091.000	89
					Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		Persentase pelaku usaha ekspor,import yang dibina	Persen				Rp 1.331.500	Rp 1.331.500	100
						Pembinaan/Validasi Pelaku Usaha Impor (API)	Jumlah calon/pelaku usaha yang dibina	Pelaku usaha	25	25	100	Rp 1.331.500	Rp 1.331.500	100
					PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Persentase stok SEMBAKO yang memenuhi kebutuhan	Persen	100	100	100	Rp 38.808.900	Rp 38.803.500	100
						Monitoring Distribusi SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya	Jumlah laporan evaluasi ketersediaan sembako	bulan	12	12	100	Rp 2.349.400	Rp 2.349.400	100
						Monitoring Perkembangan Harga SEMBAKO dan Barang Penting Lainnya dan Inflasi Daerah	Stabilitas harga SEMBAKO dan Barang penting lainnya	bulan	12	12	100	Rp 36.459.500	Rp 36.454.100	100
						Gelar Dagang Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi					Rp -	Rp -	
					PROGRAM PERLUNDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Persentase hasil temuan pengawasan barang beredar yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	Rp 2.268.275.750	Rp 2.261.287.378	100
						Fasilitasi Pasar Murah Menjelang Hari Raya	Jumlah Operasi pasar murah	Kali	2	2	100	Rp 1.910.084.000	Rp 1.910.000.000	100
						Operasional UPT Kemetrologian Daerah	Jumlah Alat UTP yang ditera ulang	UTTP	2250	9908	440,36	Rp 356.415.750	Rp 349.511.378	98
						Pengawasan Barang Beredar	Jumlah barang beredar yang diawasi	Kali	12	12	100	Rp 1.776.000	Rp 1.776.000	100





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	KEGIATAN						ANGGARAN		
						URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya sektor industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16,17	17,41	108	PENGEMBANGAN IKM DAN INDUSTRI KREATIF		Persentase pelaku industri yang terlatih	Persen				Rp 44.184.000	Rp 44.184.000	100
						Pengujian dan Monev Produk Pangan	Jumlah Produk Pangan yang diuji	Produk	30	30	100	Rp 44.184.000	Rp 44.184.000	100
						Promosi dan Pameran Produk Industri	Jumlah produk industri kreatif yang dipromosi	Produk				Rp -	Rp -	-
						Pembinaan dan Pelatihan Industri	Jumlah IRT/IKM yang dilatih	IRT/IKM				Rp -	Rp -	-
					PENGEMBANGAN INDUSTRI KIMIA ARGO DAN HASIL HUTAN (IKAHH)		Persen Produk pangan industri yang memenuhi standar keamanan	Persen				Rp -	Rp -	-
						Penilaian Kompetensi dan pemeriksaan Kelayakan Perizinan Industri	Jumlah industri yang di monitor dan di evaluasi	Industri				Rp -	Rp -	-
							Persentase Produk pangan industri yang memenuhi standar keamanan	Persen				Rp 500.000	Rp 500.000	100
						Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah sarana dan prasarana industri untuk produk unggulan yang ditingkatkan	unit				Rp 500.000	Rp 500.000	100
Meningkatnya daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang Berkualitas	4	12,33	308	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH		Persentase pelaku usaha mikro yang dilatih	Persen				Rp -	Rp -	-
						Pelatihan dan Motivasi Kewirausahaan	Jumlah pelaku usaha mikro yang dilatih	unit				Rp -	Rp -	-
							persentase UKM non BPR / LKM aktif					Rp 60.130.000	Rp 60.030.000	100
						Pengembangan Pemasaran Berbasis IT	Jumlah Sistem e-commerce	sistem	1	1	100	Rp 60.130.000	Rp 60.030.000	100
					PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Promosi Produk Koperasi dan UMKM	Jumlah pelaku usaha yang partisipasi dalam pameran							
							Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro					Rp -	Rp -	-
						Sosialisasi dan Fasilitasi Akses Pembiayaan dan Kemitraan KUMKM	Jumlah KUMKM yang difasilitasi dan monev					Rp -	Rp -	-
						Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah usaha mikro yang memiliki sarana prasarana standar					Rp -	Rp -	-





Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	KEGIATAN						ANGGARAN		
						URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UKM		Persentase Koperasi simpan pinjam/Usaha Simpan Pinjam yang bernilai Sehat	persen				Rp 448.033.020	Rp 423.522.723	95
						Motivasi Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	Jumlah Koperasi yang dimotivasi	Kop	50	50	100	Rp 26.530.300	Rp 26.530.000	100
						Sosialisasi dan Penyuluhan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang dimonev	Kop			#DIV/0!	Rp -	Rp -	-
						Pelatihan dan Penilaian Pengelolaan Koperasi	Jumlah KSP/USP yang dinilai	Kop			#DIV/0!	Rp 421.502.720	Rp 396.992.723	94
					PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA		Persentase PKL yang diberdayakan	PKL				Rp 52.526.425	Rp 52.490.000	100
						Penataan dan Pengendalian PKL	Jumlah PKL yang dibina	PKL				Rp 52.526.425	Rp 52.490.000	100
					PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Jangka waktu pelayanan administrasi perkantoran	bulan	12	12	100	Rp 1.280.839.687	Rp 1.260.259.385	98
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pelunasan tagihan jasa Komunikasi, SDA dan listrik	bulan	12	12	100	Rp 332.002.000	Rp 313.422.950	94
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya ATK	bulan	12	12	100	Rp 21.834.087	Rp 21.797.000	100
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan	12	12	100	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase berfungsi komponen instalasi/penerangan	bulan	12	12	100	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	rasio pemenuhan bahan bacaan dan peraturan terkait	bulan	12	12	100	Rp 11.760.000	Rp 11.500.000	98
						Penyediaan Makanan dan Minuman	rasio pemenuhan makanan dan minuman	bulan	12	12	100	Rp 4.900.000	Rp 4.891.500	100
						Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	persentase koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	100	Rp 20.604.000	Rp 20.604.000	100
						Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran	Tingkat penguasaan TUPOKSI	bulan	12	12	100	Rp 2.740.000	Rp 2.482.500	91
						Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	Penyediaan Jasa lain kantor	bulan	12	12	100	Rp 409.769.600	Rp 408.556.435	100
						Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	bulan	12	12	100	Rp 459.230.000	Rp 459.005.000	100
						Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan di Kota Pontianak	Penyediaan Jasa lain kantor	bulan	0	0		Rp -	Rp -	-





PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jalan Alianyang No. 7 C Telp.(0561)730416 Fax.(0561)730416
PONTIANAK 78116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. HARYADI S. TRIWIBOWO
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak.

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT
Jabatan : Walikota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Walikota Pontianak,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Pontianak, 27 Oktober 2020

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
dan Perdagangan Kota Pontianak,



Ir. HARYADI S. TRIWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan sektor perdagangan dalam negeri	1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	14,61%
2	Meningkatkan Sektor Industri	2. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	16,17 %
3	Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro	3. Kontribusi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB	4,00 %

Program	Anggaran
1. Program Pembinaan dan pengembangan pasar tradisional (IK.1)	RP. 3.710.458.100
2. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor (IK.2)	RP. 1.331.500
3. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri (IK.2)	RP. 38.808.900
4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan (IK.2)	RP. 2.268.275.750
5. Program Pengembangan IKM dan Industri Kreatif (IK.3)	RP. 44.184.000
6. Program pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) (IK.3)	RP. 0
7. Program Pengembangan Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka (IK.3)	RP. 500.000
8. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah (IK.4)	RP. 0
9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (IK.4)	RP. 60.130.000
10. Program peningkatan iklim usaha Koperasi Usaha Mikro kecil menengah (KUMKM) (IK.4)	RP. 0
11. Program peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM (IK.4)	RP. 448.033.022
12. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	RP. 52.526.425

Pontianak, Oktober 2020

Walikota Pontianak,

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak,


Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM,MT


Ir. HARYADI S. TRIWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630227 199003 1 006



**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK**

Jalan Alianyang No. 7 C Pontianak

Telp/Fax : (0561) 730416 email : dkump@pontianakkota.go.id